KEPUTUSAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MELAKUKAN EKSPANSI PASAR PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

FAIZ BISMA VEANESTA AZHAR

21323197

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

KEPUTUSAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MELAKUKAN

EKSPANSI PASAR PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

FAIZ BISMA VEANESTA AZHAR

21323197

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Keputusan Pemerintah Australia dalam Melakukan Ekspansi Pasar Pendidikan Tinggi di Indonesia

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Februari 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.	
2	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	
3	Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Februari 2025



Faiz Bisma Veanesta Azhar

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR SINGKATAN ix
ABSTRAK x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 9
1.7 Argumen Sementara 13
1.8 Metode Penelitian 14
1.8.1 Jenis Penelitian 14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 14
1.8.4 Proses Penelitian 14
1.9 Sistematika Pembahasan 15
BAB 2 KONTEKS SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI DALAM KERANGKA IA-CEPA 16
2.1 Konteks Pendidikan Tinggi Australia 16
2.1.1 Pendidikan Tinggi sebagai Komoditas Ekspor Jasa 16
2.1.2 Strategi Ekspansi Pasar 20
2.2 Kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia 27
2.2.1 Pendidikan Tinggi sebagai Komoditas Ekspor Jasa 27
2.2.2 Strategi Internasionalisasi 32
BAB 3 KERJA SAMA JASA PENDIDIKAN TINGGI AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM KERANGKA IA-CEPA 37
3.1 Kepentingan Australia dan Indonesia 37
3.2 Strategi *Cooperative* dan Potensi *Defection* 44
3.3 Analisis *Payoff* dalam Upaya Kerja sama Pendidikan Tinggi 55
BAB 4 PENUTUP 63
4.1 Kesimpulan 63
4.2 Rekomendasi 64
DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Hasil dari Stag Hunt 12
Tabel 2.1 Sepuluh Peringkat Teratas Ekspor Barang dan Jasa Australia Tahun 2021—2023..... 17
Tabel 2.2 Sepuluh Negara OECD dengan Rata-Rata Pengeluaran Tertinggi untuk Pendidikan Tinggi Tahun 2021 19
Tabel 2.4 Daftar Universitas di Australia Berdasarkan Wilayah 21
Tabel 2.5 Tantangan untuk *Offshore Transnational Education* 26
Tabel 2.6 Daftar Komoditas Ekspor Indonesia Tahun 2021—2023..... 30
Tabel 2.7 Kegiatan atau Program Internasionalisasi Pendidikan Tinggi 33
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Asal Indonesia di Luar Negeri..... 39
Tabel 3.2 Analisis Pasar *Transnational Education* (TNE) di Indonesia..... 49
Tabel 3.3 Dampak Positif Kampus Cabang PTA bagi Indonesia 50
Tabel 3.4 Isu-Isu dalam Pendirian Kampus Cabang di Indonesia 52
Tabel 3.5 Skema Hasil *Stag Hunt* mengenai Upaya Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia..... 57
Tabel 3.6 Implementasi *Stag Hunt* dalam Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia 58
Tabel 3.7 Hasil *Payoff* Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia .. 60
Tabel 3.8 Ketentuan Kerja sama Pendidikan Tinggi dalam IA-CEPA..... 61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Mahasiswa Asal Asia Tenggara di Luar Negeri 40
Grafik 3.2 Jumlah Mahasiswa Indonesia di Australia Tahun 2016—2019 40
Grafik 3.3 Jumlah Mahasiswa Indonesia Tahun 2016—2019 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Daftar *International Branch Campuses* (IBCs) Universitas-Universitas Australia 25

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
FTA	:	*Free Trade Area*
IA-CEPA	:	Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement
IBCs	:	*International Branch Campuses*
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PT	:	Perguruan Tinggi
PTA	:	Perguruan Tinggi Asing
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
STEAM	:	*Science, Engineering, Arts, and Mathematics*
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TNE	:	*Transnational Education*
UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UU	:	Undang-Undang
VET	:	*Vocational Education and Training*
WTO	:	World Trade Organization

ABSTRAK

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia mengalami perkembangan yang baik, meskipun terdapat dinamika selama proses perjalanannya. Di era ini, Indonesia memiliki kebutuhan untuk memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) dikelola dengan baik dan mencetak generasi yang berkualitas, tetapi terdapat permasalahan mengenai kualitas pendidikan tinggi dengan segudang masalahnya. Di sisi lain, Australia memiliki sistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan bereputasi memiliki penawaran untuk bisa membuka kampus-kampus cabang universitasnya di Indonesia dalam membantu menangani permasalahan tersebut. Namun, belum ada kerja sama yang jelas antar kedua negara yang mengatur mengenai Perguruan Tinggi Asing di Indonesia bisa beroperasi. Melalui kerangka IA-CEPA yang sedang dinegosiasikan selama 2016—2019, kedua negara mencoba membahasnya. Kepentingan dan faktor pendorong lainnya wajar terjadi dalam menjajakan kerja sama, Teori *Stag Hunt* dapat digunakan untuk memotret hal demikian. *Stag Hunt* berusaha memahami kondisi masing-masing pihak yang mungkin dapat bertindak *cooperate, defect,* ataupun keduanya sekaligus. Dengan konsep tersebut, penelitian ini menjelaskan kepentingan dan faktor pendorong kerja sama pendidikan tinggi Australia dan Indonesia. Penulis menemukan bahwa kedua negara sama-sama memiliki strategi *cooperate* dalam proses perundingan IA-CEPA. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara memiliki titik temu kepentingan walaupun ada hambatan selama proses perundingan berlangsung.

Kata-kata kunci: Australia, Indonesia, IA-CEPA, *Stag Hunt*, Kampus Cabang.

ABSTRACT

Australia and Indonesia's bilateral relationship has grown well, yet there has been dynamics along the way. Presently, Indonesia is keen to ensure properly managed human resources and raise a quality generation. However, Indonesia suffers from a myriad of problems regarding the quality of higher education. In contrast, Australia, which has a qualified and reputable higher education system, proposes to set up international branch campuses of its universities in Indonesia to support this problem. Unfortunately, the two countries have not yet formed a clear cooperation to allow foreign universities operating in Indonesia. Through the IA-CEPA framework being negotiated during 2016-2019, both countries are seeking to explore this. While interests and other factors are commonly seen in peddling cooperation, the concept of Stag Hunt could be applied to this. Stag Hunt seeks to comprehend each party's condition that may cooperate, defect, or both at once. Drawing on this concept, this research explains the interests and factors behind Australia and Indonesia's higher education co-operation. The author found that both countries have a cooperate strategies in the IA-CEPA negotiation process. This is since countries share common interests regardless of the challenges faced during the negotiation process.

Keywords: Australia, Indonesia, IA-CEPA, *Stag Hunt*, *Branch Campuses*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia sudah terjalin selama 75 tahun yang dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia dengan berbagai situasi yang kian dinamis sesuai perkembangan geopolitik regional maupun global. Relasi bilateral kedua negara mengalami kondisi fluktuatif seiring dengan kondisi ekonomi dan politik di tingkat regional maupun global. Kondisi bilateral Indonesia dan Australia meneguhkan posisi hubungan yang semakin solid dengan diratifikasinya kerja sama Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA oleh kedua negara. Kerja sama ini didasari atas kepentingan masing-masing negara dalam menyediakan bentuk kerja sama yang lebih komprehensif dalam merintis potensi dari kemitraan kedua negara (Patunru, Surianta, dan Audrine 2021, 8).

IA-CEPA efektif diberlakukan pada 2020 melalui proses yang sangat panjang. Isi dari kerja sama tersebut secara terperinci mengatur pada ruang lingkup kebijakan perdagangan barang dan jasa, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan perluasan kerja sama di bidang inovasi serta industri (Department of Foreign Affairs and Trade 2018). Kesepakatan ini mengakomodasi kepentingan dari masing-masing negara melalui berbagai implementasi yang diharapkan akan berdampak pada integrasi perekonomian di wilayah masing-masing (Rusmin, Suryadi, dan Abdullah 2021, 135).

Dalam proses kesepakatan, IA-CEPA menempuh jalan panjang selama perundingannya. Inisiasi kerja sama ini dimulai sejak adanya Joint Declaration of

Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia yang menjadi modal dasar Indonesia dan Australia untuk menjajaki potensi kerja sama yang lebih riil berupa *Free Trade Agreement* (Department of Foreign Affairs and Trade 2018). *Free Trade Agreement* (FTA) adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota sehingga barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan lebih mudah antar negara tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan mengurangi biaya dan memudahkan akses pasar (Athukorala 2020, 2). Dalam dokumen resmi Australia, *Australian Defense White Paper 2016*, terdapat hipotesis bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan di kawasan Asia Tenggara di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi Australia untuk menguatkan kerja samanya dengan Indonesia.

Dari sisi Australia, IA-CEPA akan membawa manfaat sebagai langkah dalam memperoleh surplus perdagangan melalui peningkatan akumulasi nilai ekspor, mendapatkan produk barang dan jasa unggulan dengan biaya kompetitif, diversifikasi kegiatan kemitraan di sektor perekonomian, kemudahan akses investasi, kepastian iklim perdagangan dan bisnis dengan Indonesia, solusi bagi hambatan investasi, dan membantu Australia untuk menciptakan kondisi yang relatif stabil dan makmur dari sisi perekonomian di kawasan (Campbell 2020). Kebutuhan atas kerja sama IA-CEPA dapat ditinjau dari adanya interdependen ekonomi yang semakin meningkat antara Australia dan Indonesia dengan situasi di Asia Pasifik yang semakin kompetitif. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Australia memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2.36% dari 2016-2019,

sedangkan Indonesia sebesar 5.07% pada periode yang sama (Australian Bureau of Statistics 2024; Ahdiat 2023). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu menciptakan permintaan yang tinggi pada tenaga kerja terampil dan pengembangan SDM, sehingga mendorong Indonesia untuk menjalin kemitraan agar mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kemampuan bagi tenaga kerja. Di lain pihak, Australia menyadari potensi untuk memperluas pasar ekspor pendidikan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi. Adanya pertemuan kepentingan melalui IA-CEPA bagi kedua negara ini merupakan peluang untuk bekerja sama sebab akan memberi dampak pada pembangunan SDM, peningkatan penelitian dan pengembangan, dan daya saing di pasar global (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 94).

Termuatnya sektor pendidikan tinggi dalam kerangka IA-CEPA merupakan bentuk pengakuan terhadap pendidikan tinggi sebagai penyokong pembangunan ekonomi dan sosial. Sektor pendidikan tinggi di Australia merupakan salah satu sektor yang kuat dengan memiliki 212 institusi pendidikan tinggi yang bereputasi dan berkualitas dengan 1.551.411 mahasiswa terdaftar pada 2024 (Department of Education 2024b; Tertiary Education Quality and Standards Agency 2024). Australia dikenal dengan destinasi pendidikan tinggi bereputasi di dunia berkat sistem pendidikan tinggi berstandar tinggi dan sangat kompetitif. Di sisi lain, sektor pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan, meskipun terdapat pembagian tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi antara pemerintah melalui Perguruan Tinggi Negeri dan masyarakat melalui Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 2022, terdapat 4.522 institusi pendidikan tinggi dengan 9.320.410 mahasiswa terdaftar (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2022, 2). Namun demikian, tingkat penyerapan mahasiswa baru hanya 36%, sehingga menunjukkan

adanya potensi pasar yang belum tersentuh dengan optimal (PwC Indonesia 2023, 3). Secara statistik menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Kerja sama antara Australia dan Indonesia di sektor pendidikan tinggi melalui IA-CEPA juga akan memberikan dampak positif bagi kedua negara yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga turut berkontribusi pada pembangunan negara. Meskipun demikian, rata-rata masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat berpenghasilan menengah, yakni sekitar 47,85 juta atau setara dengan 17,13% dari total populasi (Ahdiat 2024). Angka tersebut menjadi persoalan tersendiri sebab pendidikan tinggi memerlukan sumber daya keuangan yang mencukupi. Pada konteks tenaga kerja, Indonesia masih memiliki kendala karena mayoritas pekerja merupakan lulusan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) dengan proprosi 54,59% yang menjadi fenomena miris sebab kualifiasi pendidikan pada tenaga kerja masih pada level rendah atau secara umum tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu (Gitiyarko 2023). Di sisi lain, terdapat banyak aspirasi untuk melakukan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi sebagai medianya. Kombinasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang meraih gelar pendidikan tinggi.

Pada 2019, IA-CEPA yang disepakati oleh Australia dan Indonesia meregulasi aspek pendidikan tinggi dalam dokumennya. Hal ini membuka kesempatan untuk Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk membuka institusinya di Indonesia. Perjanjian tersebut membuahkan hasil pada tahun 2022, Monash

University membuka kampus cabangnya di Tangerang Selatan, Banten. Kampus ini memiliki misi untuk membuka peluang dalam kerja sama penelitian dan kemitraan dengan akademisi, dukungan profesional bagi lulusannya, sekaligus memungkinkan kesempatan kerja sama komersial dengan industri (Monash University 2024). Langkah awal Monash University ini kemudian disusul oleh beberapa perguruan tinggi Australia lain, seperti Western Sydney University, Deakin dan Lancaster University, dan University of Central Queensland yang turut membuka kampus cabangnya di Indonesia (Savitri 2024).

Dalam konteks yang lain, transformasi kondisi global yang semakin dinamis dan kompleks mengharuskan Australia merumuskan strategi-strategi multidimensional yang bertujuan dalam memperkuat posisinya di kancah global (T. Wilkins 2023, 105). Adanya IA-CEPA diharapkan akan mengurangi ketergantungan Australia pada negara atau wilayah tertentu dan meningkatkan resiliensi perekonomian domestiknya melalui berbagai peluang kerja sama untuk kompetitif di pasar global (Pratama dan Yuliana 2024, 29). Selain itu, kerja sama yang merupakan perpaduan strategi dan kepentingan nasional akan membentuk lingkungan regional yang damai di tengah persaingan (Teo 2022, 1155). Kemitraan merupakan usaha penting bagi Australia untuk mengamankan agenda kepentingan nasionalnya dalam memberikan rasa aman menghadapi tantangan regional maupun global (Sindhu 2023, 229). Meskipun dalam prosesnya terdapat persaingan dan keragaman antara satu dengan yang lain, Australia tetap berupaya terus menjaga hubungan dengan Indonesia dalam rangka mempererat kerja sama (Frost 2016, 193).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, IA-CEPA muncul sebagai usaha pemerintah Australia yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya liberalisasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepentingan nasionalnya mengenai ekspansi pasar pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Australia memutuskan untuk melakukan ekspansi pasar pendidikan tinggi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif dan kepentingan Australia dalam menjalin kerja sama jasa pendidikan tinggi dengan Indonesia dalam IA-CEPA.
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Australia dalam menyepakati IA-CEPA.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus penelitian ini ialah menganalisis motif, kepentingan, dan strategi Australia untuk menjalin kerja sama jasa pendidikan tinggi dengan Indonesia dalam IA-CEPA pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 merupakan tahun dimulainya kembali perundingan IA-CEPA oleh Indonesia dan Australia setelah sebelumnya pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi dinamika politik antara kedua negara (Fitriani 2018, 38). Pada tahun 2019 dipilih karena merupakan tahun diratifikasinya IA-CEPA oleh Australia

(Shirlow 2019). Penelitian ini akan terbatas pada lingkup kerja sama pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Australia dengan Indonesia dan menggunakan perspektif Australia sebagai landasan kerangka pemikiran untuk menganalisis motif dan kepentingannya dalam menyepakati IA-CEPA.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang berasal dari artikel jurnal. Referensi pertama berasal dari tulisan Astari Marisa berjudul "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam Meratifikasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* Tahun 2019" yang dipublikasikan di Jurnal Transborders pada tahun 2020, menganalisa bahwa Australia memiliki motif kepentingan neoliberalisme untuk mencapai keuntungan absolut dari kegiatan ekonomi dan interdependensi ekonomi pada perjanjian IA-CEPA (Marisa 2020, 27). Marisa juga menjabarkan aspek kerja sama ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong Australia dalam meratifikasi IA-CEPA (Marisa 2020, 31). Namun, artikel ini cukup menyederhanakan kompleksitas perjanjian IA-CEPA dan mengesampingkan peranan geopolitik yang memengaruhi kawasan.

Pada konteks posisi Australia dalam konstelasi perekonomian global, Carl Ungerer menulis artikel berjudul "*The "Middle Power" Concept in Australian Foreign Policy"* yang dipublikasikan di *Australian Journal of Politics and History* pada tahun 2007. Artikel ini menganalisa bahwa Australia menjadi negara yang tidak begitu memainkan peranan penting dalam konstelasi perpolitikan dan ekonomi di dunia. Ungerer berpendapat bahwa Australia hanya memiliki peran

sebagai negara *middle power* yang disebabkan oleh kebijakan dan perilaku negara ini, seperti mempertahankan prinsip independensinya dalam penentuan kebijakan di lingkup aliansi, bertindak pragmatis dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia, dan hanya bertumpu pada praktik kerja-kerja politik normatif yang memiliki manfaat untuk masyarakat dunia (Ungerer 2007, 550). Ketiga sudut pandang Australia ini yang kemudian diidentifikasi dan diartikulasikan oleh Carl Ungerer untuk melabelkan *middle power country* pada Australia dalam proses menghasilkan kebijakan luar negerinya.

Kajian mengenai dinamika kebijakan luar negeri Australia diteliti oleh Mohan Malik melalui tulisannya berjudul "*Australia, America and Asia"* yang diterbitkan di *Pacific Affairs* pada tahun 2018 berisi komparasi proses kerja sama Australia dengan Amerika sebagai salah satu mitra utama yang ternyata tidak memberikan signifikansi keuntungan bagi Australia (Malik 2006, 595). Dalam realitasnya, Malik mencoba mengulik lebih dalam tentang relasi Australia dengan poros Asia, salah satunya dengan Tiongkok yang terbukti memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian Australia dibandingkan dengan Amerika. Pada kondisi yang demikian, Australia tetap perlu menyeimbangkan pola relasinya dengan Amerika dan Tiongkok sebagai mitra strategis yang kemudian hal ini dipandang oleh Malik sebagai upaya *hedging strategy* Australia untuk menyikapi kemitraan dengan negara-negara tersebut (Malik 2006, 594).

Sependapat dengan Mohan Malik, Renuka Mahadevan dan Anda Nugroho dalam "*Can the Regional Comprehensive Economic Partnership Minimise the Harm from the United States-China Trade War"* yang diterbitkan di *The World Economy* pada tahun 2019 mencoba untuk menjelaskan lebih faktual mengenai

dinamika perekonomian dan perdagangan global yang semakin kompleks sehingga memerlukan cara tersendiri dalam menyikapinya. Mahadevan dan Nugroho menganalisis kerja sama ekonomi komprehensif mampu menjadi salah satu solusi dari ketidakpastian ekonomi global yang dinamis dan fluktuatif (Mahadevan dan Nugroho 2019, 1). Dalam penelitiannya, ditemukan fakta bahwa hasil komparasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi komprehensif akan memberikan dampak positif bagi negara dalam memanfaatkan peluang baru di tengah ekonomi global. Dengan demikian, berbagai negara dipandang perlu untuk melakukan kerja sama ekonomi komprehensif sebagai jalan keluar alternatif dari gejolak yang ada.

Berdasarkan artikel-artikel di atas, terdapat keterkaitan antarsumber yang membuka celah bagi penelitian lebih lanjut. Keterkaitan ini menunjukkan perlunya wawasan baru untuk memahami motif Australia dalam menyepakati IA-CEPA. Penelitian sebelumnya cenderung menyederhanakan faktor-faktor pendorongnya hanya kepada konteks geopolitik yang kecil dan interdependensi ekonomi yang terlibat. Selain itu, penting untuk menelaah konteks posisi Australia di kawasan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yang kerap menggunakan strategi *hedging*. Pendalaman urgensi kerja sama komprehensif bagi suatu negara juga menjadi aspek penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Stag Hunt* akan digunakan sebagai kerangka pemikiran pada penelitian ini. Pendekatan ini merupakan bagian dari *Game Theory* yang kerap digunakan untuk menganalisis pola-pola aktivitas tertentu yang melibatkan

beberapa aktor. Aktivitas tersebut membutuhkan kepercayaan antarpihak untuk memastikan hasil yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat (Skyrms 2004, 3). *Stag Hunt* sejatinya teori yang mengakar dari konsep kontrak sosial dengan mengilustrasikan situasi dilematik antara kerja sama dan keamanan (Skyrms 2004, 1).

Brian Skyrms menjabarkan konsep *Stag Hunt* di bukunya yang berjudul *The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure*. Dalam logika sederhana, *Stag Hunt* diilustrasikan dengan beberapa kondisi, seperti (1) setiap pemburu diharuskan bekerja sama guna mendapatkan keuntungan maksimal, (2) keuntungan saat bekerja sama akan lebih besar dengan kondisi masing-masing pemburu tidak memilih tindakan alternatif secara sepihak, dan (3) para pemburu sebisa mungkin mengesampingkan tindakan alternatif untuk mencapai kerja sama. Kondisi yang dilematik ini mengharuskan masing-masing pemburu untuk berpikir secara cermat sebab pemburu dapat saja dengan mudah mendapatkan kelinci seorang diri (*defect*), tetapi jika ingin mendapatkan rusa sebagai hewan buruan tentu diperlukan kerja sama dengan pemburu lainnya (*cooperate*) (Skyrms 2004, 1).

Skyrms menjabarkan bahwa usaha untuk mendapatkan rusa (yang diasosiasikan sebagai tangkapan terbaik) tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang pemburu saja, melainkan diperlukan kerja sama dengan pemburu lain (*cooperate*) untuk mendapatkannya (Skyrms 2004, 1). Kedua pemburu sebenarnya memiliki pilihan dalam menentukan langkahnya untuk mendapatkan sesuatu, bersikap kooperatif (*cooperative*) atau membelot (*defects*). Jika salah satu pemburu enggan bekerja sama, opsi *defects* merupakan cara terbaik dan logis untuk diambil oleh pemburu lainnya. Oleh karena itu, para pemburu tentu ingin mendapatkan hasil

terbaik dan akan mengupayakan skema *cooperative* bisa terjadi (Skyrms 2004, 3). Pada *Stag Hunt*, terdapat empat skenario yang mungkin terjadi, yakni:

1. Kedua pemburu mencapai titik kepercayaan dan bekerja sama dalam menangkap rusa, sehingga mendapatkan keuntungan maksimum (*cooperate, cooperate*);
2. Salah satu pemburu membelot karena memburu kelinci, sehingga pemburu yang lain tidak bisa mendapatkan rusa dan kelinci (*defect, cooperate*);
3. Salah satu pemburu memutuskan bekerja sama dalam berburu rusa, tetapi pemburu lain membelot dengan berburu kelinci, sehingga pemburu rusa tidak mendapatkan apapun (*cooperate, defect*); dan
4. Kedua pemburu sepakat tidak bekerja sama dan tidak ingin ada yang membelot dalam berburu rusa, sehingga mereka hanya berburu kelinci yang keuntungannya bernilai lebih kecil daripada berburu rusa (*defect, defect*).

Pada konteks *payoff* (imbalan), pemburu kelinci dengan risiko minim hanya perlu dilakukan oleh seorang diri dan mendapatkan *payoff* sebesar 3 (Skyrms 2004, 3). Namun, pemburu rusa tentu memiliki *payoff* lebih besar, yakni 4 yang apabila ada pihak membelot maka hanya mendapatkan *payoff* sebesar 1 dan pihak yang membelot tersebut mendapat *payoff* sebesar 3 (Skyrms 2004, 3). Selain itu, terdapat konsep *Nash Equilibria* dengan ketentuan bahwa kedua pemburu akan mendapatkan *payoff* sama besar, yakni 4, 4 (*payoff-dominant* equilibrium) atau 2, 2 (*risk-dominant equilibrium*) (Skyrms 2004, 3). Hal ini dikarenakan berburu rusa merupakan usaha yang baik jika pemburu lain menginginkan hal yang sama dan berlaku sama ketika berburu kelinci. Meskipun demikian, para pemain tetap memiliki sikap yang berbasiskan kepentingannya masing-masing dalam perburuan

tersebut. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat skema hasil atas masing-masing pilihan, yakni *defect* dan *cooperate* sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skema Hasil dari Stag Hunt

	Cooperate	***Defect***
Cooperate	4, 4	1, 3
Defect	3, 1	2, 2

Sumber: Brian Skyrms (2004).

Sebagai salah satu pendekatan pada konteks Hubungan Internasional, keberadaan *Stag Hunt Theory* akan melahirkan kondisi dua pihak yang saling mendapatkan hasil sama besar atau *positive-sum game* (Skyrms 2004, 95). Namun, dalam realitasnya kondisi tersebut sangat bergantung dengan pilihan masing-masing pihak. Di sisi lain, meskipun kondisi perburuan akan menghasilkan tangkapan yang terbaik dengan berburu rusa, tetapi mungkin saja terjadi masalah baru, yakni ketidakpastian mengenai bagaimana hasil buruan rusa akan dibagikan setelah ditangkap (Skyrms 2004, 113). Terdapat kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara besaran yang dibagikan dengan harapan masing-masing pemburu dan pemburu rusa yang serakah akan berpotensi egois dalam mendapatkan hasil sesuai keinginan ketika berhadapan dengan pemburu rusa yang rendah hati (Skyrms 2004, 114). Oleh karena itu, dalam memperoleh hasil yang maksimal, masing-masing pemburu akan melakukan negosiasi mengenai besaran dari hasil tangkapan (Skyrms 2004, 113).

Pada konteks kerja sama IA-CEPA, *Stag Hunt Theory* akan membantu menganalisis sikap kedua negara dalam menyepakati kerja sama tersebut, terutama

bagi Australia. Kedua negara tentu memiliki agenda kepentingannya masing-masing yang mungkin saling berbenturan atau beririsan secara tujuannya. Oleh sebab itu, proses mencapai persetujuan kerja sama dari kedua negara dapat ditinjau dengan konsep *cooperative* atau bahkan *defects* yang ada pada *Stag Hunt Theory*. Kedua hal ini mungkin terjadi sebab hubungan kedua negara memiliki jejak historis yang bertensi fluktuatif, sehingga menarik untuk melihat faktor pendorong bagi masing-masing negara dalam proses penyusunan kerja sama IA-CEPA.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan serangkaian rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran maka argumen sementara dari penelitian ini ialah bahwa universitas asal Australia membuka kampus cabang di Indonesia dikarenakan terdapat regulasi yang mengaturnya melalui kerja sama Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Di sisi lain, sebagai negara, Australia melihat peluang yang besar untuk turut membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan para lulusannya agar mampu bersaing pada pasar tenaga kerja. Kerja sama ini berhasil disepakati karena terdapat sikap *cooperative* dari kedua negara. Sikap *cooperative* merupakan opsi terbaik yang dipilih oleh Australia mengingat IA-CEPA akan mendorong pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan sekaligus memberikan dampak bagi perekonomian bagi Australia karena sektor ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Dengan demikian, Australia tidak bersikap *defects* karena manfaat yang akan didapatkan dari kerja sama pendidikan tinggi menjadi pilihan

terbaik bagi negara ini. Bersikap *defects* dalam kerja sama hanya akan menjauhkan Australia dari potensi dan peluang di masa mendatang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Tulis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif ideal dalam mengidentifikasi berbagai fenomena melalui rekayasa deskriptif menyeluruh dan holistik (Walidin, Saifullah, dan Tabrani 2015, 77).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek penelitian, yakni pemerintah Australia sebagai aktor yang melakukan kerja sama IA-CEPA dengan Indonesia. Adapun objek penelitiannya ialah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh Australia dalam kerja sama IA-CEPA.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data bersumber dari data-data sekunder, seperti artikel jurnal, buku, laporan, laman situs, maupun prosiding. Penelitian ini turut menyertakan hasil teori yang akan dipelajari, dikutip, dan dianalisis berkaitan dengan tema yang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian akan diawali dengan rangkaian proses penelitian yang akan dilakukan dan dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yang relevan terkait topik penelitian. Kemudian penulis akan membaca, mempelajari, dan mengklasifikasikan poin-poin esensial dari data sekunder.

Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antarsumber data, pengelompokan data, dan dipadukan dengan bagian dalam penelitian yang relevan. Proses penelitian diakhiri dengan pendeskripsian hasil temuan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

a. Bab I: Pendahuluan. Pada bagian ini akan dipaparkan latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
b. Bab II: Konteks Sektor Pendidikan Tinggi dalam Kerangka IA-CEPA. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konteks pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia yang meliputi pendidikan tinggi sebagai ekspor jasa serta strategi ekspansi pasar pendidikan tinggi.
c. Bab III: Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia dalam Kerangka IA-CEPA. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kepentingan Australia dan Indonesia dalam upaya kerja sama pendidikan tinggi, strategi *cooperate* dan potensi *defect*, sekaligus analisis *payoff* dalam upaya kerja sama pendidikan tinggi.
d. Bab IV: Kesimpulan. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan menyeluruh dari temuan penelitian dan rekomendasi terkait penelitian ini.

BAB 2

KONTEKS SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI DALAM KERANGKA IA-CEPA

2.1 Konteks Pendidikan Tinggi Australia

2.1.1 Pendidikan Tinggi sebagai Komoditas Ekspor Jasa

Pendidikan tinggi telah menjadi salah satu komoditas ekspor jasa yang sangat dinamis dan strategis bagi perekonomian domestik Australia. Australia berada di posisi ketiga destinasi populer di sektor pendidikan yang berasal dari 191 negara (UNESCO Institute for Statistics 2024a). Pendidikan tinggi Australia memiliki sumbangsih terhadap pembangunan SDM global, di ranah regional, dan menjaring hubungan yang kuat dalam upaya memfasilitasi diplomasi bisnis dan perdagangan (Universities Australia 2013, 10). Menurut data dari Australian Bureau of Statistics, sektor pendidikan tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan bagi perekonomian Australia dengan menempati posisi keempat, setelah energi dan mineral (Department of Foreign Affairs and Trade 2024). Sektor pendidikan tinggi Australia dalam lima tahun (2019—2024) terakhir juga memiliki tren pertumbuhan yang positif dengan mencatatkan angka sebesar 15% (Department of Foreign Affairs and Trade 2024). Selain itu, sektor pendidikan tinggi Australia ditopang oleh berbagai perguruan tinggi yang berkualitas dan bereputasi. Keunggulan Australia dalam sistem pendidikan tinggi berhasil menjadi negara yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang memiliki daya tawar tinggi.

Tabel 2.1 Sepuluh Peringkat Teratas Ekspor Barang dan Jasa Australia Tahun 2021—2023

(dalam juta Dolar Australia)

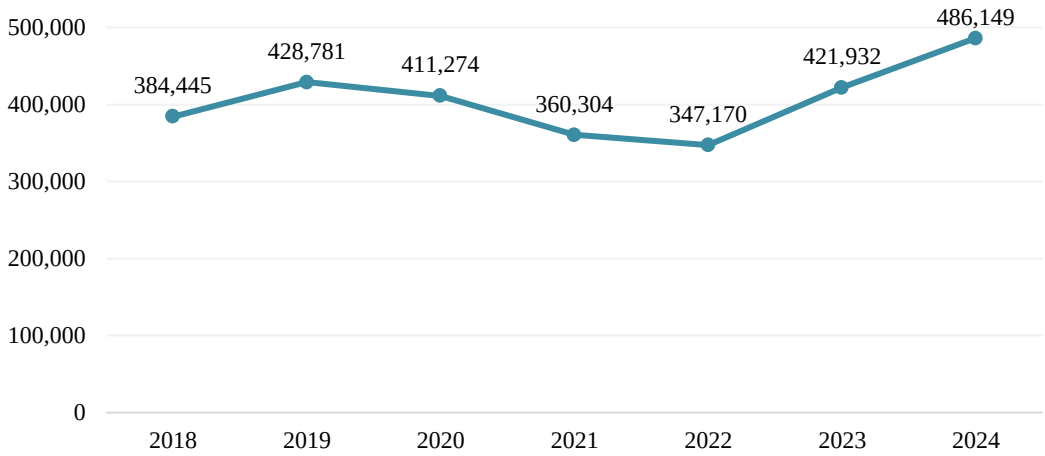
No	Komoditas	2021	2022	2023
1	Biji Besi & Konsentrat	154.656	124.213	136.262
2	Batu Bara	63.505	142.345	103.188
3	Gas Alam	49.811	90.343	74.322
4	**Pendidikan**	**22.023**	**26.590**	**47.819**
5	Emas	23.281	23.513	28.351
6	Mineral Mentah	1.823	12.227	18.849
7	Perjalanan Pariwisata	412	7.561	18.700
8	Gandum	9.436	14.457	13.959
9	Minyak Mentah	10.113	14.424	11.467
10	Daging Sapi	9.062	10.271	11.462

Sumber: Department of Foreign Affairs and Trade (2024).

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 komoditas ekspor emas bernilai lebih tinggi dibandingkan pendidikan. Namun, tahun 2022 sektor pendidikan tumbuh dengan baik dan menghasilkan ekspor bernilai AUD 26.590 juta atau tumbuh sebesar 20,7%. Sektor pendidikan tinggi Australia kembali tumbuh dengan baik pada tahun 2023 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 79,83% dan bernilai AUD 47.819 juta, melebihi ekspor emas yang hanya bernilai AUD 28.351 juta. Angka ini menunjukkan bahwa Australia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan sektor pendidikan tinggi sebagai komoditas ekspor prioritasnya dalam jangka panjang.

Pada tahun 2024, terdapat setidaknya 486.149 mahasiswa asing yang mengenyam pendidikan tinggi di Australia. Angka ini secara tahun ke tahun terus tumbuh positif, walaupun terdapat penurunan selama pandemi COVID-19, yakni 2020—2022 (Department of Education 2024a). Pertumbuhan jumlah mahasiswa asing di Australia menunjukkan resiliensi sistem pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Grafik 2.1 Mahasiswa Asing di Australia Tahun 2018—2024



Sumber: Department of Education (2024a).

Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan kontribusi bagi pendapatan dari komponen biaya kuliah yang dibayarkan setiap tahun oleh para mahasiswa, tetapi juga ikut memberikan sumbangsih terhadap berbagai sektor perekonomian lainnya. Mahasiswa asing yang berkuliah di Australia tentu akan memiliki pengeluaran pada aspek tempat tinggal/akomodasi, makanan, transportasi, hiburan, dan berbagai hal pendukung lainnya. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development dalam Education at a Glance 2024 menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran untuk pendidikan tinggi pada tahun 2021 di Australia dalam setahun adalah USD 24.837, berada di atas rata-rata negara OECD, yakni USD 20.499 (Organisation for Economic Co-operation and Development 2024, 5). Biaya yang dikeluarkan akan memberikan dampak langsung bagi komunitas-komunitas di dekat perguruan tinggi maupun secara nasional.

Tabel 2.2 Sepuluh Negara OECD dengan Rata-Rata Pengeluaran Tertinggi untuk Pendidikan Tinggi Tahun 2021

(dalam dolar AS)

No	Negara	Pengeluaran Rata-rata Setahun
1	Luxemburg	60.264
2	Amerika Serikat	36.274
3	Inggris	33.574
4	Swedia	27.765
5	Denmark	26.781
6	Norwegia	26.299
7	**Australia**	**24.837**
8	Kanada	24.406
9	Austria	24.206
10	Belanda	23.864

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (2024).

Laporan Deloitte dalam The Importance of Universities to Australia's Prosperity tahun 2015 menunjukkan bahwa pasar pendidikan tinggi Australia akan memberikan dampak pada pembangunan negara melalui dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional dengan SDM dan modal sosial yang berkualitas, menggerakkan kemajuan teknologi sekaligus pertumbuhan ekonomi melalui penelitian dan pengembangan, juga memberdayakan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial pendidikan tinggi (Deloitte 2015, 13).

Lebih lanjut, Deloitte menyatakan bahwa sektor pendidikan tinggi Australia di tahun 2018 memperkerjakan 132.000 orang pada kegiatan operasional universitas, telah berkontribusi USD 23,2 miliar secara langsung pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Australia (Deloitte 2020, i). Apabila aktivitas hulu sektor pendidikan tinggi turut dihitung, pendidikan tinggi Australia memiliki dampak ekonomi yang lebih besar sebab memperkerjakan 186.500 tenaga kerja di tahun 2018 dan berkontribusi untuk PDB sebesar USD 31 miliar (Deloitte 2020, 5).

Secara global, tingkat pencapaian pendidikan tinggi dan tingginya investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor pendidikan tinggi menujukan bukti akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita (Deloitte 2015, 6). Setiap kenaikan 1% untuk investasi pada penelitian dan pengembangan di universitas diperkirakan turut menghasilkan 0,13% pertumbuhan ekonomi Australia dalam jangka panjang (Deloitte 2020, ii). Hal tersebut akan meningkatkan PDB Australia sebesar USD 2,4 miliar per tahun pada tahun-tahun mendatang (Deloitte 2020, ii). Berdasarkan konteks tersebut, investasi pada perguruan tinggi sesungguhnya akan menjadi investasi bagi Australia di masa depan.

Sektor pendidikan tinggi Australia secara data menunjukkan peranan yang signifikan sekaligus menjadi salah satu komoditas ekspor prioritas bagi perekonomian Australia. Selanjutnya, Australia memiliki peluang yang terbuka lebar untuk terus memperkuat fondasi pendidikan tingginya sebagai sektor unggulan dan unik dalam perekonomian, sehingga tidak hanya berdampak secara domestik tapi turut serta dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Hal ini perlu dibersamai dengan peningkatan kualitas dan reputasi di setiap aspek pendidikan tinggi Australia.

2.1.2 Strategi Ekspansi Pasar

Globalisasi yang terjadi dengan cepat turut berimbas pada sektor pendidikan tinggi karena proses pembelajaran yang berlangsung semakin berfokus pada penyiapan lulusan bagi pasar kerja di level global dan penelitian juga turut diharapkan tanggap pada faktor-faktor eksternal yang didorong oleh pasar serta pendanaan (Liyanag dan Nima 2016, 2; Jones dan Killick 2013, 166). Universitas

sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan tinggi di Australia, bertransformasi dari yang semula hanya sekadar berfokus pada capaian pendapatan semata menjadi capaian interaksi global yang lebih terintegrasi melalui jejaring pendidikan tinggi internasional dan diarahkan untuk mengembangkan hubungan yang sudah ada maupun menjalin kemitraan baru dengan universitas-universitas di kawasan Indo-Pasifik (Liyanag dan Nima 2016, 3). Dengan demikian, pendidikan tinggi Australia harus sebisa mungkin mengekspansi pasar agar menjangkau lebih banyak pihak yang terlibat dalam proses pengintegrasian pendidikan tinggi ke dunia internasional.

Australia sendiri pada saat ini memiliki 42 universitas yang terdiri dari 37 universitas negeri dan 5 universitas swasta. Universitas-universitas tersebut berada di berbagai negara bagian/*states* dan teritori/*territories* yang turut mendorong strategi ekspansi pasar pendidikan tinggi dan memperluas jejaring internasional sebagai upaya untuk mengintegrasikan pendidikan tinggi lebih mengglobal. Kampus baru yang tersebar di berbagai wilayah, menyesuaikan target pasar yang disasar, seperti lokasi-lokasi regional dan pusat bisnis di daerah tertentu agar semakin membuka peluang dalam menggaet mahasiswa baru (Benner, Grant, dan O'Kane 2022, 54). Selain itu, keberadaan kampus baru di berbagai tempat akan memperbesar peluang kompetisi dalam menyediakan pilihan kepada calon mahasiswa mengenai kualitas dan keunggulan masing-masing universitas yang semakin mudah dijangkau oleh calon mahasiswa itu sendiri.

Tabel 2.3 Daftar Universitas di Australia Berdasarkan Wilayah

No	Wilayah	Nama Universitas
1	New South Wales	1. Australian Catholic University 2. Avondale University 3. Charles Sturt University 4. Macquarie University

No	Wilayah	Nama Universitas
		5. Southern Cross University 6. The University of Technology Sydney 7. University of New England 8. University of New South Wales 9. University Newcastle 10. University of Sydney 11. University of Wollongong Western Sydney University
2	Victoria	1. Deakin University 2. Federation Unversity Australia 3. La Trobe University 4. Monash University 5. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University 6. Swinburne University of Technology 7. University of Divinity 8. University of Melbourne 9. Victoria University
3	Queensland	1. Bond University 2. Central Queensland University (CQ University) 3. Griffith University 4. James Cook University 5. Queensland University of Technology 6. The University of Queensland 7. University of Sunshine Coast
4	South Australia	1. Flinders University 2. The University of South Australia 3. Torrens University 4. University of Adelaide
5	Western Australia	1. Curtin University 2. Edith Cowan University 3. Murdoch University 4. The University of Notre Dame Australia The University of Western Australia
6	Tasmania	University of Tasmania
7	Northern Territory	Charles Darwin University
8	Australian Capital Territory	1. The Australian National University 2. University of Canberra

Sumber: Study Australia (2024).

Distribusi universitas-universitas di Australia pada setiap negara bagian dan teritori menjadi strategi dalam melakukan ekspansi pasar. Kebijakan otonomi bagi universitas diterapkan pada 1986 yang berdampak pada peningkatan mahasiswa

asing yang signifikan dengan jumlah mahasiswa asing pada 1988 hanya 18.000 dan meningkat sebesar 26 kali lipat menjadi 486.149 di tahun 2024 (Universities Australia 2013, 26; Department of Education 2024a). Kebijakan tersebut juga didukung upaya internasionalisasi melalui pendidikan transnasional/*transnational education* (TNE). Majelis Eropa mendefinisikan pendidikan transnasional sebagai berikut:

> "*All types of higher education study programmes, or sets of courses of study, or educational services (including those of distance education) in which the learners are located in a country different from the one where the awarding institution is based. Such programmes may belong to the education system of a State different from the State in which it operates, or may operate independently of any national education system*." (Council of Europe 2002).

Pada konteks ini, Australia memiliki pemaknaan tersendiri mengenai pendidikan transnasional, yakni pendidikan transnasional merujuk pada mereka yang belajar di luar negeri/*offshore* untuk membedakan dengan pendidikan internasional yang bermakna hanya kepada mahasiswa asing belajar di Australia (Croucher dkk. 2021, 3). Dalam konteks TNE, terdapat dua jenis untuk membedakan antarkeduanya, yakni pendidikan transnasional yang mengacu pada pendidikan berbasis kampus luar negeri/*offshore* dan pendidikan internasional yang mengacu pada model "daring" sebab dirancang secara khusus untuk mahasiswa di negara atau merambah di pasar tertentu (Croucher dkk. 2021, 3).

TNE yang dikategorikan menjadi *offshore* memiliki dua kategori, yakni layanan yang didukung oleh mitra dan kampus cabang. Dalam bagian penelitian ini, kampus cabang akan menjadi fokus bahasan utamanya. Kampus cabang/*International Branch Campuses* (IBCs) merupakan layanan pendidikan tinggi dengan menghadirkan kampus fisik di negara tuan rumah yang dikelola sepenuhnya atau bersama-sama oleh institusi asal dan mitra serta menyediakan

program-program serupa dari institusi asal tersebut (Croucher dkk. 202, 4). Universitas-universitas di Australia sudah mengembangkan arah TNE dengan membuka kampus-kampus cabang di luar negeri sebagai strategi ekspansi pasar yang memungkinkan menjaring lebih besar mahasiswa asing untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi Australia tanpa perlu terbang dan menetap di Australia selama proses pendidikannya.

Kampus cabang menjadi instrumen universitas Australia dalam menjangkau potensi pasar pendidikan tinggi sebab kampus cabang tidak hanya menjadi "perwakilan" institusi semata, melainkan bentuk yang lebih luas dari model pendidikan tinggi yang selama ini diterapkan. Pasar pendidikan tinggi di dunia bergerak kompetitif dan memiliki tantangan dengan sistem peraturan di negara yang dituju. Strategi pembukaan kampus cabang oleh universitas-universitas Australia juga memungkinkan pertukaran budaya, pengetahuan, dan inovasi lintas batas sebab mendorong universitas Australia akan tumbuh pesat melewati batas-batas ruang yang selama ini diberlakukan oleh kampus di dalam negeri (Chapman dan Pyvis 2015, 10–11). Namun, universitas-universitas Australia perlu menemukenali kondisi sosial dan politik dari negara tujuan sebagai tantangan yang sangat mungkin memengaruhi proses TNE, dalam hal ini IBCs sebab ketidakpastian kondisi tersebut menjadi faktor yang akan menarik institusi asing untuk melakukan aktivitas TNE (Chapman dan Pyvis 2015, 171).

Selain itu, pendidikan tinggi perlu mewaspadai dan mempersiapkan tantangan ketidakpastian di sektor industri, seperti ketidakpastian *input*/suplai tenaga kerja, dinamika di pasar, dan ketidakpastian persaingan/pendatangan baru yang lain (Wilkins 2016, 172). Pada realitasnya, universitas-universitas Australia

berhasil mendirikan IBCs di berbagai negara yang membuktikan adaptasi dan kelincahan institusi pendidikan tinggi untuk menyesuaikan peluang dan tantangan yang ada. Keberhasilan pendirian kampus cabang juga dibasiskan pada kemampuan setiap universitas itu sendiri untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan di tempat kampus cabang tersebut, seperti menyesuaikan dengan kurikulum lokal yang tetap relevan pada konteks sosial-budaya negara penerima. Kemitraan strategis dengan negara-negara juga menjadi langkah penting karena kerangka kebijakan antarnegara sering kali berbeda dan menimbulkan kondisi-kondisi khusus. Kesuksesan TNE dalam jangka panjang pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kelincahan institusi menangkap peluang, tetapi kedalaman analisis pasar yang memadai.

Gambar 2.1 Daftar *International Branch Campuses* (IBCs) Universitas-Universitas Australia

(sampai tahun 2019)



Sumber: Department of Education (2019).

Dari 42 universitas di Australia, hanya 15 universitas diantaranya yang memiliki kampus cabang sebagai strategi ekspansi pasar. Meskipun secara statistik

hanya 35% kampus Australia mempunyai IBCs, tetapi pada 2023 terdapat 43.599 mahasiswa yang belajar di kampus-kampus *offshore* (Department of Education 2023). Croucher dkk. (2021) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam upaya mendirikan kampus cabang oleh universitas-universitas Australia yang disebabkan karena memasuki pasar yang bervariasi dan kesulitan untuk menentukan biaya yang akan diterapkan secara proporsional.

Tabel 2.4 Tantangan untuk *Offshore Transnational Education*

No	Tantangan
1	Kesulitan mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran karena kebijakan *firewall* dari negara tujuan
2	Minimnya informasi yang jelas mengenai persyaratan bagi *joint programmes*
3	Perpajakan di negara tujuan
4	Kompleksitas mengenai kurikulum yang akan dipakai
5	Hambatan dalam memperoleh visa untuk staf pendukung dari negara asal
6	Mencari mitra universitas yang sesuai
7	Kesulitan dalam menjaring mahasiswa lokal
8	Kekhawatiran akan kebebasan akademik di negara tujuan
9	Kompetisi dengan universitas yang berskala lebih besar
10	Kesulitan untuk menyesuaikan peraturan dan regulasi di negara tujuan
11	Perbedaan dalam kapasitas bahasa Inggris

Sumber: Croucher dkk. (2021).

Meskipun terdapat tantangan dalam pendirian IBCs sebagaimana pada Tabel 2.5, pasar TNE tetap membuka peluang potensial karena terus bertumbuh dalam tahun-tahun mendatang sebab didorong oleh permintaan terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang (Murthi dan Bassett 2022). Di sisi yang lain, tren pada akses globalisasi pendidikan tinggi mengalami hambatan pada mobilitas mahasiswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh biaya maupun kondisi lainnya (Murthi dan Bassett 2022). Proses yang berlangsung dalam TNE perlu memunculkan keuntungan pada masing-masing pihak dengan peluang tinggi dalam mencapai keberhasilannya,

sehingga kekhawatiran oleh universitas penyedia dan negara tujuan mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisasi. Dengan demikian, strategi untuk mengekspansi pasar oleh universitas-universitas Australia tetap dapat berjalan dengan baik dan menjadi langkah yang optimal dalam memperluas potensi dari TNE melalui pembukaan kampus-kampus cabang di luar negeri.

2.2 Kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia

2.2.1 Pendidikan Tinggi sebagai Komoditas Ekspor Jasa

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sektor yang belum dirasakan oleh mayoritas masyarakat karena berbagai faktor. Padahal, secara demografi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memastikan masyarakat memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga pasar tenaga kerja menjadi diisi oleh tenaga kerja terampil. Menurut OECD, pada tahun 2023 hanya 17,9% dari populasi berumur 25-34 tahun di Indonesia yang mendapatkan gelar pendidikan tinggi (Organisation for Economic Co-operation and Development 2023). Rendahnya populasi yang mendapatkan pendidikan tinggi menunjukkan mayoritas masyarakat masih kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial karena adanya hambatan menggapai pendidikan tinggi dan hasilnya hanya kaum-kaum elit yang mampu mendapatkan akses atas pendidikan tinggi (Prasetyo 2024, 6; Hutabarat 2017, 145). Isu rendahnya tingkat pendidikan tinggi ini juga memiliki isu lain, yakni liberalisasi pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan pada dasarnya merupakan paradigma yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai jasa yang diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi (Ferdiansyah R 2015, 127).

Bagi Indonesia, liberalisasi pendidikan tinggi belum menjadi sektor yang bisa diperdagangkan semasif Australia ataupun negara-negara lainnya. Diskursus liberalisasi pendidikan tinggi berkembang di masyarakat dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pilihan mengenai untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam konteks internasionalisasi, yaitu kerja sama pendidikan tinggi di lingkup global dan pendirian kampus cabang oleh Perguruan Tinggi Asing (PTA). Pada pilihan pertama, institusi Pendidikan Tinggi (PT) di Indonesia dapat bekerja sama dengan PTA di lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau yang sering disebut Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka mengintegrasikan dimensi global dengan kegiatan PT atau internasionalisasi (Ferdiansyah R 2015, 139). Pada pilihan kedua, PTA dimungkinkan membuka kampus cabang di Indonesia yang berlokasi di daerah-daerah tertentu, harus bekerja sama dengan PT dalam negeri, berizin pemerintah, mengikuti standardisasi yang ditetapkan, memperkerjakan dosen dan tenaga pendidikan lokal, serta harus berkarakter nirlaba (Ferdiansyah R 2015, 139).

Di sisi lain, implementasi UU Nomor 12 Tahun 2012 memiliki kelemahan tersendiri sebab hanya menginginkan PT harus tetap bersifat nirlaba, berbeda dengan regulasi dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai bagian dari kegiatan komersial (Ferdiansyah R 2015, 140). Hal tersebut masih menjadi penghalang Indonesia untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang diperdagangkan karena terhambat regulasi domestik. Di sisi lain, pemerintah juga membatasi kepemilikan oleh PTA

hanya sebatas 50%, sehingga dalam pengelolaannya tetap memerlukan kerja sama dengan PT dalam negeri dengan bentuk usaha patungan.

Pada dimensi yang lain, banyak negara-negara memandang pendidikan tinggi dengan menggunakan perspektif bisnis, sehingga mereka berusaha melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan sektor pendidikan tingginya, seperti halnya internasionalisasi pendidikan tinggi yang dilakukan secara masif. Berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki isu sistem pendanaan, jaminan kualitas, dan reputasi di level global (Zamroni 2008, 7). Zamroni (2008) menekankan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi sebenarnya bisa direalisasikan apabila pemerintah meregulasinya dengan aturan perdagangan jasa pendidikan, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar baru yang dimanfaatkan dan tetap memiliki peranan yang jelas.

World Trade Organization (WTO) sejatinya sudah mengatur bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari komoditas yang diperdagangkan, sehingga negara-negara dapat memanfaatkannya sebagai sektor perdagangan dalam ekspor maupun impor. World Trade Organization (2022) membagi penyediaan jasa pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Model 1 - *Cross-Border Supply*: Model ini memanfaatkan layanan internet sebagai media yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi, sehingga tidak ada mobilitas secara fisik.
2. Model 2 - *Consumption Abroad*: Model ini merupakan model yang sering terjadi sebab konsumen (mahasiswa) perlu datang di negara tujuan atau sering disebut mobilitas siswa, sehingga akan memberikan nilai tambah/*added value* melalui biaya-biaya yang muncul.

3. Model 3 - *Commercial Presence*: Model ini memungkinkan institusi pendidikan tinggi asing membuka lembaga institusinya di negara lain, sehingga terdapat mobilitas lembaga dan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA).
4. Model 4 - *Presence of Natural Persons*: Model ini merupakan mobilitas sementara yang dilakukan oleh individu atau institusi ke negara lain, seperti adanya dosen yang mengisi kuliah di negara lain.

Indonesia sendiri lebih sering mempraktikkan 3 dari 4 model di atas, yakni model 1, 2, dan 4. Hal ini terjadi dengan beragam program yang selama ini dijalankan, seperti *twin program*, *credit transfer*, *dual degree*, pertukaran dosen dan mahasiswa, pemanfaatan sumber daya akademik, kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kolaborasi penyelenggaraan kegiatan ilmiah (Ferdiansyah R 2015, 135). Meskipun secara ragam program terlihat variatif, tetapi belum mengindikasikan usaha optimal Indonesia untuk menjadikan sektor pendidikan tinggi sebagai komoditas ekspor jasa sebagaimana negara-negara lain.

Tabel 2.5 Daftar Komoditas Ekspor Indonesia Tahun 2021—2023

(dalam juta Dolar Amerika Serikat)

No	Komoditas	2021	2022	2023
1	Minyak dan Gas	1.068,01	1.457,78	1.478,94
2	Pertanian	401,59	369.43	355,16
3	Industri Pengolahan	17.045,02	16.423,24	15.691,67
4	Pertambangan	3.799,01	5.502,78	4.831,28
5	Lain-lain (Sektor yang tidak mencakup pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan)	43,46	29,50	34,23

Sumber: Kementerian Perdagangan (2024).

Berdasarkan Tabel 2.7, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas barang. Bagi Indonesia, kiblat pendidikan tinggi terdisrupsi oleh ambisi universitas-

universitas yang terobsesi untuk bersaing secara global. Upaya yang dilakukan akhirnya bertujuan pada pasar, privatisasi, komersialisasi, dan menjadikan kuantitas sebagai ukuran yang perlu di kejar (Wahyudi 2015, 51). Selain itu, pendidikan tinggi Indonesia yang berperilaku semakin kapitalis akan menguntungkan masyarakat kelas atas dibanding sifat inklusivitas yang sejatinya merupakan tanggung jawab bersama, tidak terkecuali pemerintah dan masyarakat itu sendiri (Wahyudi 2015, 53). Maneejuk dan Yamaka (2021) membeberkan fakta bahwa pendidikan tinggi di wilayah ASEAN bisa memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi hingga dua kali lebih besar jika berhasil mengimplementasikan dua hal, yakni memperluas akses pendidikan tinggi yang diiringi oleh kondisi mahasiswa berkualitas saat mendaftar dan mengimbangi kebutuhan industri dengan kuantitas mahasiswa di bidang-bidang yang relevan.

Persimpangan paradigma yang terjadi antara liberalisasi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dan kompetisi global akhirnya menimbulkan perspektif yang bertolak belakang melalui asumsi dari masing-masing pihak, padahal apabila kualitas pendidikan tinggi berkembang dengan baik serta kompetitif maka bisa menjadi komoditas ekspor yang mendatangkan mahasiswa asing dan berkontribusi pada perekonomian negara. Terlebih lagi, liberalisasi pendidikan tinggi sejatinya bisa meningkatkan keuntungan yang besar, baik secara keuangan maupun reputasi pendidikan tinggi itu sendiri.

Di sisi penerimaan mahasiswa asing sebagai ciri dalam upaya mengekspor pendidikan tinggi, Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara sekitar. Pada tahun 2021, Singapura memiliki 58.269 mahasiswa asing, Malaysia 170.000 mahasiswa asing, dan Vietnam memiliki 16.000 mahasiswa asing (Al

Qurtuby 2023; UNESCO Institute for Statistics 2023; Viet Nam News 2024). Indonesia, di tahun yang sama hanya memiliki 3.896 mahasiswa asing yang melanjutkan studinya di pendidikan tinggi Indonesia (Harususilo 2023). Rendahnya angka mahasiswa asing ini menjadi salah satu indikator yang menyulitkan institusi pendidikan tinggi Indonesia bersaing di level global dengan menarik perhatian para mahasiswa asing tersebut. Hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beragam faktor, seperti penyebarluasan informasi yang terbatas, tawaran program pembiayaan/beasiswa yang terbatas, keraguan atas kualitas dan reputasi institusi pendidikan tinggi Indonesia, permasalahan bahasa yang digunakan saat perkuliahan, sistem administrasi izin tinggal, perbedaan iklim dengan negara asal, serta isu keamanan (Fadhli 2024). Dengan demikian, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam mengupayakan sektor pendidikan tinggi sebagai komoditas ekspor jasa yang menghasilkan dan menjanjikan.

2.2.2 Strategi Internasionalisasi

Kompetisi global pada era sekarang memasuki berbagai lini, termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Negara-negara maju, seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang memberikan gambaran bagi Indonesia bahwa terdapat keterhubungan antara sistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan bereputasi dengan kompetensi SDM yang terus berkembang dengan baik, sehingga mampu menyediakan tenaga kerja unggulan (Astuti 2016, 1). Salah satu bentuk kegiatan untuk mengembangkan sistem pendidikan tinggi adalah dengan mengupayakan internasionalisasi melalui pembauran pengetahuan level global pada ranah pendidikan tinggi tersebut (Shin dan Harman 2009, 2).

Internasionalisasi dapat mendorong institusi perguruan tinggi berkompetisi pada level global. Berbagai negara yang mempunyai institusi berlabel kelas dunia memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda sekaligus keunggulan dari masing-masing institusi tersebut, seperti keragaman sumber pendanaan institusi, sirkulasi pendapatan yang tinggi, kontribusi pada perekonomian di tingkat domestik, keragaman tenaga kerja, dan bermuara pada usaha yang menarik tenaga kerja dan mahasiswa asing (Maringe 2010, 25). Adapun bentuk dari internasionalisasi pendidikan tinggi bisa dilakukan melalui beragam cara selama program dan kegiatan-kegiatan tersebut bersentuhan dengan aspek internasional atau bertujuan untuk merambah pasar global.

Tabel 2.6 Kegiatan atau Program Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

No	Kegiatan atau Program Internasionalisasi Pendidikan Tinggi
1	*International undergraduate students* Mahasiswa asing program sarjana
2	*International post graduate students* Mahasiswa asing program pascasarjana
3	*Students exchange programs* Program pertukaran mahasiswa
4	*Staff eexchange programs* Program pertukaran tenaga pendidik
5	*Staff interaction in international context* Interaksi tenaga pendidik/tenaga kependidikan dalam konteks internasional
6	*Internationally focused program of study* Program studi yang berfokus pada upaya internasionalisasi
7	*Attendance to international conferences* Menghadiri kegiatan konferensi tingkat internasional
8	*International research collaboration* Kerja sama penelitian tingkat internasional
9	*Internationally recognised research activity* Kegiatan penelitian tingkat internasional terekognisi
10	*Support for international students* Dukungan bagi mahasiswa asing
11	*International institutuional links* Jejaring ke institusi internasional
12	*Overseas curriculum* Kurikulum internasional

No	Kegiatan atau Program Internasionalisasi Pendidikan Tinggi
13	*Overseas trained staff* Tenaga pendidik/tenaga kependidikan terlatih secara internasional

Sumber: Elkin, Devjee, dan Farnsworth (2005).

Dalam konteks internasionalisasi institusi pendidikan tinggi di Indonesia, sebenarnya upaya internasionalisasi pada Tabel 2.8 merupakan program yang dijalankan oleh berbagai universitas-universitas di Indonesia. Namun, upaya tersebut sebenarnya memiliki tujuan lain, yakni perbaikan kualitas dan mengejar standardisasi untuk menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu (Knight 2007, 217—218). Untuk mengusahakan tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) memiliki kerangka kebijakan dalam upaya mengembangkan internasionalisasi institusi pendidikan tinggi dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan konferensi keilmuan di level nasional ataupun internasional;
2. Pemberian doktor kehormatan kepada pemenang Nobel;
3. Partisipasi ataupun penyelenggara kegiatan internasional;
4. Pengembangan laman institusi pendidikan tinggi secara menyeluruh dan konsisten;
5. Melakukan pemasaran ke luar negeri;
6. Pengembangan kerja sama internasional;
7. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kompetisi di level internasional;
8. Melakukan penelitian kolaborasi antarpeneliti lokal, regional, ataupun internasional;
9. Pengembangan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
10. Mendatangkan dosen asing untuk menjadi dosen tamu dan peneliti;

11. Pengintegrasian program studi dengan akreditasi internasional yang bergengsi; dan
12. Pengiriman dosen ke luar negeri dalam program pertukaran dosen;

Kebijakan yang dibuat oleh kementerian selaku regulator di bidang pendidikan tinggi, nyatanya belum bisa menempatkan universitas-universitas Indonesia bersaing di level global. Institusi pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana yang sudah dipaparkan, memiliki perdebatan paradigmatik mengenai internasionalisasi itu sendiri. Internasionalisasi kerap dipandang sebagai upaya liberalisasi. Namun, di sisi yang lain, hal tersebut merupakan langkah untuk bisa berkompetisi di kancah global dan pada akhirnya bisa berkontribusi pada perekonomian domestik yang bisa ditempuh dengan upaya menjadikan sektor pendidikan tinggi sebagai komoditas ekspor jasa oleh Indonesia. Pemeringkatan institusi pendidikan tinggi yang merupakan ciri internasionalisasi di Indonesia belum serta merta memosisikan pendidikan tinggi Indonesia mampu berkompetisi dengan institusi pendidikan tinggi negara-negara sekitar. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pemeringkatan institusi pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara dengan hanya 4 institusi pendidikan tinggi Indonesia berada pada pemeringkatan Top 20 QS World University Rankings tahun 2025 untuk Asia Tenggara dan hanya 1 institusi pendidikan tinggi yang berada pada pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings tahun 2025 (QS World University Rankings 2025; Times Higher Education 2025).

Dengan demikian, upaya internasionalisasi universitas-universitas di Indonesia sebenarnya menunjukkan arah positif melalui berbagai langkah strategis yang dilakukan. Pada realitasnya memang belum dapat bersaing lebih jauh karena

isu kualitas dan liberalisasi pendidikan tinggi yang menjadi persimpangan bagi pengambil keputusan di ranah pendidikan tinggi. Apabila dibandingkan dengan negara-negara sekitar, kompetisi internasionalisasi oleh universitas-universitas Indonesia masih tertinggal dan masih belum bisa menjadi sektor yang dapat diperdagangkan dalam kegiatan ekspor.

BAB 3

KERJA SAMA JASA PENDIDIKAN TINGGI AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM KERANGKA IA-CEPA

3.1 Kepentingan Australia dan Indonesia

Peran tenaga kerja terampil menjadi komponen penting dalam daya saing dan produktivitas. Australia dan Indonesia bisa saling melengkapi di sektor pendidikan dan SDM, sehingga potensial untuk dikembangkan lebih jauh. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, tersedia peluang yang sangat bisa dikerjasamakan antara Indonesia dengan peran Australia turut membantu membangun SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga performa tenaga kerja Indonesia meningkat (Indonesia-Australia Business Partnership Group 2012, 50). Sektor pendidikan tinggi di masa depan juga akan menjadi salah satu sektor yang menarik bagi banyak negara untuk menjadikannya bagian dari upaya diversifikasi perekonomian negara melalui pendekatan yang berbeda. Australia memandang hal ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauannya dalam mengembangkan sektor pendidikan tinggi. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi mudanya.

Selain itu, Australia juga berambisi untuk menciptakan rantai pasok yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian global saat ini (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 8). Upaya tersebut juga bagian dari langkah strategis Australia untuk menjadi *economic powerhouse*. Bagi Indonesia, pengembangan kualitas SDM menjadi prioritas utama agar terdapat peluang kerja berkualitas

sekaligus mendayagunakan kondisi demografis yang memiliki populasi dengan usia produktif tinggi (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 11).

Bertemunya kepentingan kedua negara ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal berdasarkan peluang yang ada. Australia berusaha mencari peluang dalam memacu pertumbuhan dan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek serta keamanan ekonomi jangka panjang (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 17). Misi *economic powerhouse* turut mendorong kedua negara ini untuk mengembangkan hubungan bilateralnya yang lebih terintegrasi melalui berbagai langkah strategis. Dorongan tersebut akan membawa kedua negara untuk mampu berkontribusi pada *global value chains*, sehingga dapat menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan di tingkat global yang bermuara pada terciptanya kekuatan ekonomi bersama (Namira 2021, 3). Mengacu pada hal tersebut, Australia memprioritaskan empat sektor sebagai target utama dalam bekerja sama dengan Indonesia, yakni sektor kesehatan dan *aged care*; pendidikan, pelatihan, dan keterampilan; pertanian dan pangan; serta jasa sumber daya dan energi (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 20). Dengan demikian, sektor pendidikan (termasuk di dalamnya pendidikan tinggi) menjadi bahasan serius bagi kedua negara dalam kerja sama di masa yang mendatang.

Institusi perguruan tinggi di Australia semula berfokus pada rekrutmen *onshore* dan berorientasi pada lingkup yang kecil (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 13). Namun, lambat laun fokus tersebut berubah dan mulai melirik ekspansi pasar yang lebih luas di berbagai wilayah. Indonesia menjadi salah satu destinasi penjajakan prospek kerja sama di masa mendatang. Kesempatan ekspansi tersebut didukung beberapa kondisi yang menjadi faktor pendorong untuk dapat bekerja

sama berdasarkan karakteristik sistem pendidikan Australia maupun Indonesia. Di sisi Australia, institusi perguruan tinggi Australia memiliki reputasi dan kualitas yang bersaing secara global dan menjadi daya tawar tinggi untuk menjadi faktor pendorong mahasiswa asing belajar pada universitas-universitas Australia. Populasi Indonesia dengan usia muda yang semakin banyak dan konsumen kelas yang berusaha mengakses pendidikan tinggi merupakan potensi besar untuk mahasiswa asal Indonesia belajar di luar negeri. Pada tahun 2016, ada sekitar 47.755 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dan terus bertambah setiap tahunnya (UNESCO Institute for Statistics 2024b).

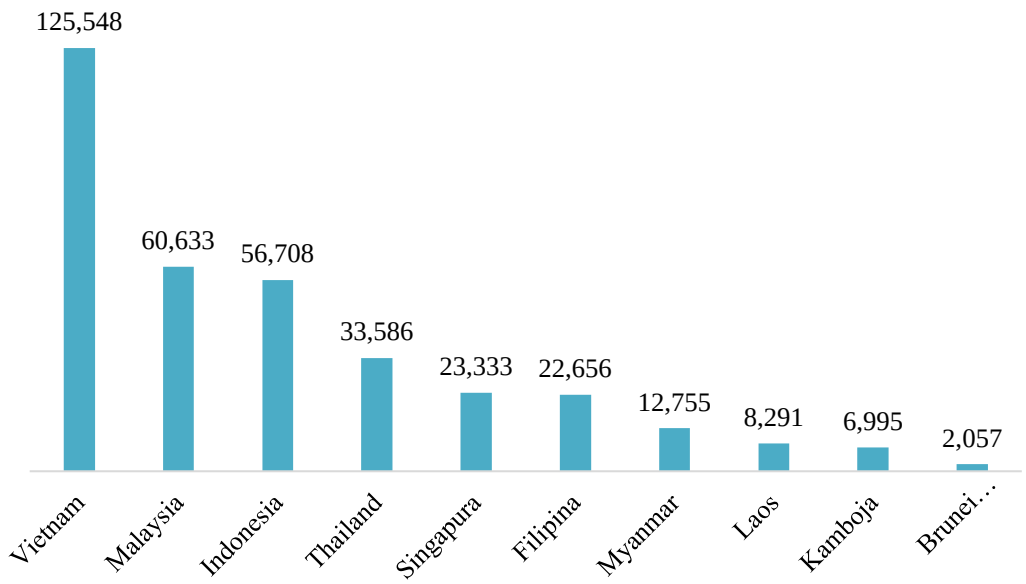
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Asal Indonesia di Luar Negeri

Tahun	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Jumlah Mahasiswa	47.755	48.550	51.820	56.708

Sumber: UNESCO Institute for Statistics (2024b).

Jika dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara yang memiliki mahasiswa belajar di luar negeri terbanyak (lihat Grafik 3.1). Kondisi ini sebenarnya relatif rendah apabila dibandingkan potensi populasi berusia produktif dan pendapatan per kapita di Indonesia. Mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di kuar negeri masih tertinggal dibanding negara lain, dengan hanya 56.708 mahasiswa. Padahal, Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih banyak dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini didorong oleh rendahnya kemampuan finansial karena biaya yang diperlukan untuk belajar di luar negeri tentu lebih besar dan tidak semua kelas masyarakat memiliki akses pembiayaan yang memadai.

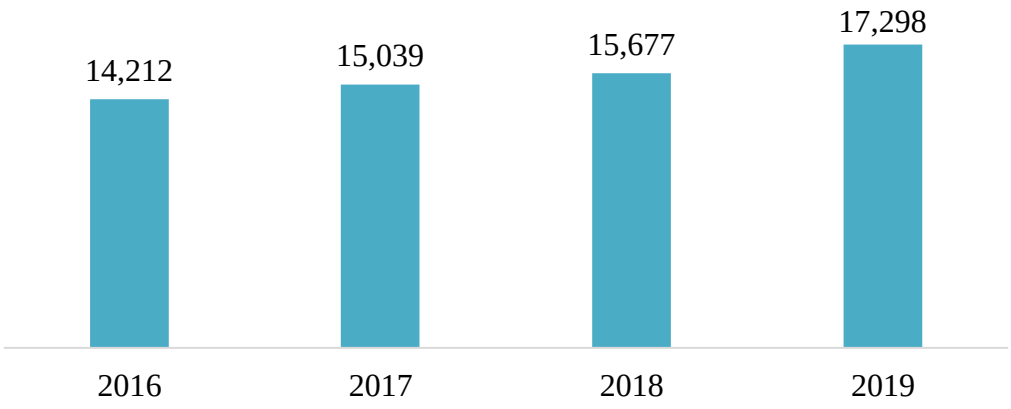
Grafik 3.1 Jumlah Mahasiswa Asal Asia Tenggara di Luar Negeri Tahun 2019



Sumber: UNESCO Institute for Statistics (2024b).

Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri menyebar di banyak negara dan Australia menjadi negara tujuan utama dengan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 19). Hal tersebut didorong oleh faktor pemasaran, kebudayaan yang mirip, dan lingkungan sosial sekaligus keagamaan yang mendukung bagi mahasiswa Indonesia berkuliah di universitas-universitas Australia (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 20).

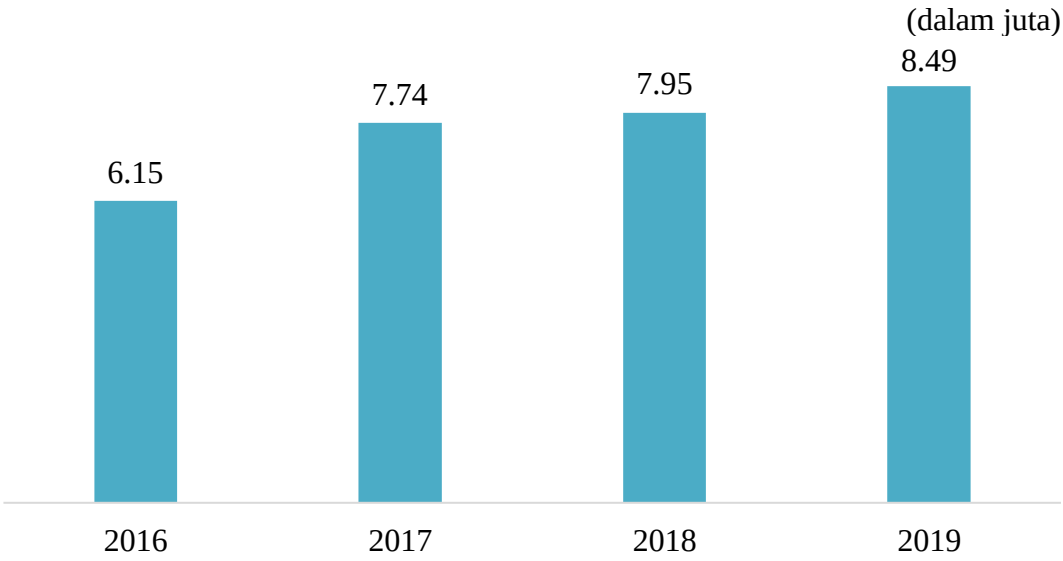
Grafik 3.2 Jumlah Mahasiswa Indonesia di Australia Tahun 2016—2019



Sumber: Department of Education (2024a).

Dalam konteks domestik, jumlah penduduk Indonesia yang berkuliah terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat Grafik 3.3). Namun, pada realitasnya terdapat isu baru antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga menimbulkan permasalahan lain. OECD mengemukakan bahwa tenaga kerja di pasaran memiliki tingkat produktivitas yang rendah karena disebabkan oleh kesenjangan keterampilan (Organisation for Economic Co-operation and Development 2020, 59). Bank Dunia juga mendorong agar Indonesia bisa meningkatkan jumlah populasi yang mendapatkan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas lulusannya secara pararel agar membawa manfaat terhadap permintaan produk dan jasa yang berkualitas tinggi melalui produktivitas yang tinggi (World Bank 2014, 4).

Grafik 3.3 Jumlah Mahasiswa Indonesia Tahun 2016—2019



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2025).

Pemerintah Indonesia kemudian menyadari perlunya mengatasi permasalahan ini dan memprioritaskan pembangunan manusia sebagai salah satu program prioritas yang termaktub dalam Making Indonesia 4.0. Program ini

merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengembalikan manufaktur Indonesia menjadi lebih baik melalui salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM (Kemenko Perekonomian 2018; Kementerian Perindustrian 2018, 8). Dalam Making Indonesia 4.0, Indonesia memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan orientasi pada capaian STEAM (*Science, Engineering, Arts, and Mathematics*), penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan di pasar industri, bekerja sama dengan berbagai pihak di bidang industri dan pemerintah luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, sekaligus menata program mobilitas global bagi tenaga kerja agar bisa bersaing (Kementerian Perindustrian 2018, 8). Selain itu, pemerintah juga memiliki beberapa langkah strategis bidang pendidikan untuk dicapai di masa mendatang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi di bidang sains dan teknologi (saintek);
2. Mendorong kapasitas saintek universitas melalui kolaborasi penelitian pada tingkat lokal maupun internasional;
3. Meningkatkan implementasi hasil penelitian di sektor industri yang mencakup insentif pajak untuk investasi penelitian;
4. Bekerja sama dengan industri untuk merancang standar kompetensi, akreditasi, dan sertifikasi; dan
5. Mengembangkan program studi yang selaras dengan prioritas nasional dan regional;

Pada aspek kualitas perguruan tinggi, Indonesia masih mengalami persoalan dalam hal persaingan kualitas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN masih mengungguli kualitas jika dibandingkan PTS, tetapi persaingan untuk menarik mahasiswa baru sangat selektif dan kuota yang terbatas. PTS mampu menerima lebih dari 68% peluang dari pendidikan tinggi, tetapi tidak serta merta dibarengi dengan kemampuan kampus dalam menghasilkan lulusan yang bersaing dan menjadikan institusinya berkualitas (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 28). Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development dan Asian Development Bank (2015) menyatakan bahwa hanya terdapat 3% dari 12.491 program studi di PTS yang terakreditasi A. Hal ini menjadi perhatian serius sebab akhirnya perguruan tinggi berlomba dalam kuantitas, bukan kualitas. Di lain pihak, pertumbuhan pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan keseimbangan dan diversifikasi yang memadai agar mencapai pemerataan akses bagi berbagai kelompok-kelompok sosial dan antarwilayah di Indonesia (OECD dan ADB 2015, 184).

Dalam konteks perekonomian, Indonesia secara konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi dengan fundamental yang baik dan mampu menekan tingkat kemiskinan secara substansial, sehingga memperluas kemungkinan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas (PwC Indonesia 2023, 7). Realitas ini disadari pemerintah bahwa investasi asing merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi perekonomian. Dalam hal ini, kesadaran akan perbaikan kualitas pendidikan tinggi bisa dilakukan dengan mengundang investasi asing. Karena itu, kepentingan Australia ialah dengan mendorong agar perguruan tingginya bisa berinvestasi di Indonesia melalui kerja sama yang dimungkinkan

guna memaksimalkan potensi pasar yang besar untuk kebutuhan pendidikan tinggi berkualitas dan turut membantu pembangunan Indonesia.

3.2 Strategi *Cooperative* dan Potensi *Defection*

Dalam Teori *Stag Hunt*, para pemain mempunyai dua pilihan, yakni memburu rusa atau kelinci. Jika pemain memilih untuk memburu kelinci maka bisa dilakukan seorang diri dan meninggalkan peluang memburu rusa dengan pemain lain atau yang dikenal dengan *defect* (Skyrms 2004, 117). Namun, jika pemain memburu rusa maka perlu bekerja sama dengan pemain lain atau yang dikenal dengan *cooperate* (Skyrms 2004, 117). Keputusan untuk pilihan berburu bertumpu pada sikap pemain lain dan kedua pemain bisa saling memengaruhi pilihan satu dengan yang lain, sehingga masing-masing pemain akan melihat respons atas pilihan pemain lain (Skyrms 2004, 107). Dengan kata lain, pilihan yang paling baik adalah ketika para pemain memilih berburu hasil buruan yang sama, baik rusa ataupun kelinci, sehingga hasil yang didapatkan optimal dan sesuai preferensi masing-masing pemain. Sederhananya, apabila pemain memilih untuk berburu kelinci atau *defect* maka pemain yang lain juga melakukan hal yang sama, hal yang sama juga apabila pemain memilih untuk berburu rusa atau *cooperate* maka pemain yang lain juga berburu rusa.

Masing-masing negara akan memainkan peran berdasarkan kepentingan, tantangan, dan hambatan. Jika ditelisik, *Stag Hunt* berpendapat hal yang sama bahwa para pemain membutuhkan rasionalitas dalam menentukan pilihan berburunya. Pilihan-pilihan rasionalitas tersebut akan memengaruhi cara bertindak dan menjalankan permainan, sehingga hasil yang mungkin didapat bisa merupakan kombinasi atas *payoff*. Adapun kombinasi tersebut ialah (1) *cooperate, cooperate*

(c, c), (2) *cooperate, defect* (c, d) atau *defect, cooperate* (d, c), serta (3) *defect, defect* (d, d). Berdasarkan hal tersebut, asumsi ketergantungan antarpihak atas pilihan masing-masing bisa saja berbeda berdasarkan kepentingan dan hambatan. Dengan demikian, teori ini akan diterapkan untuk melihat langkah Australia dan Indonesia dalam kerja sama jasa pendidikan tinggi melalui penggolongan sikap masing-masing negara menjadi *cooperate* dan *defect.*

Selama proses penjajakan kerja sama di sektor pendidikan tinggi, Australia dan Indonesia turut membahasnya dalam IA-CEPA, perjanjian kerja sama yang dibahas selama dua belas putaran sebelum mencapai kesepakatan. Kedua negara menunjukkan minatnya terhadap isu pendidikan tinggi agar masuk dalam pembahasan IA-CEPA, sehingga diperlukan masukan-masukan komprehensif dari berbagai pihak. Hal ini yang mendorong lahirnya Indonesia-Australia Business Partnership (IA-BPG) sebagai sarana bagi pelaku bisnis Australia dan Indonesia untuk berdiskusi bersama mengenai kepentingan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade 2019). Langkah ini yang menjadi strategi *cooperate* oleh kedua negara secara umum seiring dengan keputusan untuk pengaktifan kembali negosiasi IA-CEPA pada Maret 2016 yang sebelumnya sempat terhenti dari November 2014—Februari 2016 dikarenakan ketegangan diplomatik kedua negara (Rusmin, Suryadi, dan Abdullah 2021, 138). Keputusan tersebut didorong dengan tumbuhnya kepercayaan bagi kedua negara, sehingga mampu menjadi jembatan dalam mengupayakan kerja sama bilateral yang telah terhenti sebab masih terdapat interdependensi karena adanya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan domestik (Anfasa 2023, 5). Dengan demikian, hal tersebut mempertebal strategi *cooperate* bagi kedua negara.

Pada Mei 2016, negosiasi Putaran Ketiga dilakukan di Yogyakarta untuk mendiskusikan pendekatan di aspek barang, jasa, dan investasi serta kebijakan *e-commerce* sekaligus mekanisme persaingan (Rusmin, Suryadi, dan Abdullah 2021, 139; Department of Foreign Affairs and Trade 2016). Lebih lanjut, pada Putaran Keempat, masing-masing negara bersepakat untuk menyertakan pelaku usaha selama perundingan dan mendorong inisiatif kerja sama di beragam sektor (Rusmin, Suryadi, dan Abdullah 2021, 140). Kedua putaran ini menjadi aspek penting untuk membawa isu pendidikan ke dalam topik negosiasi yang lebih serius, sehingga Indonesia dan Australia kembali menunjukkan sikap *cooperate*. Lebih lanjut, pada Putaran Keenam yang berlangsung 20—24 Februari 2017 di Canberra, Australia membahas lebih dalam mengenai isu pelatihan dan pendidikan vokasional/*Vocational Education Training* (VET). Dalam putaran negosiasi ini, Indonesia mendorong masuknya sektor pendidikan agar menjadi bahasan perundingan sebab Indonesia membutuhkan peningkatan jumlah SDM berkualifikasi dan berstandar tinggi, sehingga mampu menghadirkan jasa dan keahlian bermutu (Kompas.com 2017). Putaran ini kembali menunjukkan misi kedua negara yang merupakan strategi *cooperate*.

Laporan dari Indonesia-Australia Business Partnership Group (2012) mengungkapkan bahwa sektor pendidikan tinggi membutuhkan investasi baru berskala masif yang didorong melalui peningkatan kapasitas institusi perguruan tinggi dengan penelitian dan pengembangan sekaligus mengupayakan kemitraan antarperguruan tinggi Indonesia dan Australia dalam program *twinning*, gelar ganda, juga pengembangan kurikulum dan kampus. Laporan ini mendorong kedua negara untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di sektor pendidikan tinggi yang

dapat memberikan keuntungan dalam pengembangan ekonomi (Indonesia-Australia Business Partnership Group 2012, 51). Selain itu, laporan tersebut menjadi salah satu kerangka acuan untuk dipertimbangkan dan dinegosiasikan pada perundingan-perundingan mendatang.

Selama proses negosiasi yang berlangsung pada 2016, Australia Indonesia Business Council (2016) dalam *Shaping the IA-CEPA: Realising Stakeholder Aspirations* mengemukakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional menjadi contoh dari keunggulan komparatif yang saling melengkapi. Kedua negara memiliki potensi sangat besar dalam hal tersebut, sehingga perlu merancang program-program terintegrasi sebagai langkah maju dan mendorong hal ini dalam IA-CEPA (Australia Indonesia Business Council 2016, 6). Di lain pihak, kerja sama di bidang pendidikan masih belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemerintah yang tidak responsif, minimnya kapasitas institusi pendidikan tinggi, kekhawatiran akan persaingan di pasar, dan regulasi yang menghambat investasi asing di bidang pendidikan (Australia Indonesia Business Council 2016, 45).

Pemerintah Indonesia dalam perjalanannya mendorong agar sektor jasa pendidikan menjadi peluang investasi baru bagi Australia dengan membuka *joint venture* universitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Bhaskara 2016). Sikap tersebut teridentifikasi sebagai upaya *cooperate* yang dilakukan oleh Indonesia. Sedangkan di sisi Australia, dorongan investasi di sektor pendidikan tinggi seirama dengan misi untuk memperluas peluang kemitraan pendidikan dan pelatihan di luar negeri melalui pemerintah, bisnis, dan industri sebagaimana yang tercantum dalam National Strategy for International Education 2025 (Australian Government 2016,

22). Dengan demikian, Australia juga memiliki aspirasi sikap *cooperate* sebab linear dengan agenda kepentingan nasionalnya.

Kerja sama antara universitas-universitas Australia dan Indonesia merupakan langkah penting untuk mengembangkan kapasitas dengan cepat dan membuka upaya kolaborasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Australia Indonesia Business Council 2016, 49). AIBC mengharapkan kerangka dalam IA-CEPA dapat memprioritaskan kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian universitas (Australia Indonesia Business Council 2016, 50). Selain itu, Australia Indonesia Business Council (2016) mendorong agar dalam kerangka IA-CEPA mampu mencakup beberapa hal berikut:

1. Ketentuan dalam membuka sektor universitas sebagai instrumen dalam investasi asing;
2. Ketentuan untuk membuka sektor pelatihan untuk memungkinkan sumber daya pendidikan semakin luas; dan
3. Ketentuan untuk mobilitas orang-orang terampil dalam melakukan penelitian dan pengajaran.

Dengan pelibatan pihak eksternal sebagai pemberi masukan selama proses negosiasi menjadi krusial sebab AIBC sebagai perwakilan sektor swasta juga membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan melihat peluang kerja sama di masa depan dengan kehadiran kampus cabang PTA. Meskipun Pemerintah Australia menjadi aktor utama dalam proses perundingan dengan Indonesia, masukan yang komprehensif akan memberikan sudut pandang baru dan tidak memperkaya peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Peluang-peluang pendirian

kampus cabang bagi universitas Australia di Indonesia diidentifikasi oleh Croucher dkk. (2021) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis Pasar *Transnational Education* (TNE) di Indonesia

No	Karakteristik	Peluang
1	Sistem Pendidikan Tinggi	Sistem pendidikan tinggi yang berkembang, sehingga TNE dari sudut pandang peningkatan kualitas dan kapasitas institusi pendidikan tinggi lokal.
2	*Transnational Education* (penyelenggaraan pendidikan Australia yang berkolaborasi dengan Indonesia)	- Rendahnya jumlah mahasiswa Indonesia yang terdaftar pada program TNE hanya sekitar 2.000 mahasiswa. - Terdapat permintaan signifikan yang belum dapat dipenuhi. Hingga tahun 2030, Indonesia membutuhkan lebih dari 3.000 institusi pendidikan tinggi guna memenuhi permintaan mahasiswa. - Institusi pendidikan tinggi Australia membeberkan bahwa Indonesia merupakan pasar TNE yang terbilang sukses, tetapi hal itu terbatas pada pasar yang potensial semata.
3	Kerangka Hukum	Payung hukum mengenai TNE menekankan pada upaya peningkatan perguruan tinggi melalui kerja sama dengan PTA.
4	Proses Regulasi	- Akreditasi berupa penilaian atas parameter tertentu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Pengawasan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5	Proses Jaminan Mutu	- Jaminan mutu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi basis kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia. - Pengawasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
6	Kolaborasi Penelitian	Kerja sama TNE berpotensi dalam menghasilkan kolaborasi-kolaborasi lanjutan antarlembaga mitra, termasuk peluang untuk penelitian dan industri lainnya.
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Kerja sama TNE berpotensi dalam menghasilkan kolaborasi di masa depan, termasuk dalam industri berteknologi tinggi, sosial, kesehatan, infrastruktur, dan kewirausahaan.

Sumber: Croucher dkk. (2021).

Dengan pendirian kampus cabang, Indonesia akan menerima dampak yang bermanfaat bagi iklim pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas dan memperbesar peluang penyerapan mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini didukung oleh temuan dari laporan oleh European Commission of Consumer, Trade, and Industry Services yang mengidentifikasi dampak positif dari adanya kampus cabang sebagai berikut:

Tabel 3.3 Dampak Positif Kampus Cabang PTA bagi Indonesia

No	Aspek	Dampak Positif
1	Pengembangan Institusi	- Kapasitas dalam upaya internasionalisasi yang menyeluruh dan terintegrasi - Berpartisipasi dalam kerja sama yang lebih bermanfaat dan bermakna. - Menaikkan reputasi dan pamor pasar pendidikan tinggi di Indonesia - Memungkinkan adanya komunitas praktik baik antara PTA dengan Indonesia.
2	Pengalaman Mahasiswa	- Memberikan pengalaman dan perspektif global seutuhnya bagi mahasiswa. - Menyediakan lingkungan akademik berbahasa Inggris yang berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. - Menormalisasi budaya perkembangan akademik non-linear.
3	Fakultas	- Pengenalan program studi dan mata kuliah baru. - Pengembangan kurikulum dan pembelajaran bersama. - Peluang mengembangkan karier profesional. - Mengenalkan pendekatan antardisiplin dalam pengajaran dan pembelajaran.
4	Penelitian	- Membantu pengembangan praktik penelitian. - Mendorong praktik dalam penyebarluasan penelitian, publikasi, konvensi, dan lainnya. - Mengenalkan pendekatan lintas disiplin dalam penelitian.

Sumber: Healey dkk. (2022).

Dengan demikian, proses negosiasi dalam kerangka IA-CEPA didorong untuk juga mengintensifkan pembahasan pada aspek pendidikan, termasuk

pendidikan tinggi yang salah satu tujuannya ialah kemungkinan investasi asing di Indonesia untuk mendirikan universitas-universitas asal Australia dengan diiringi kemudahan berinvestasi pada aspek tersebut. Pendirian kampus cabang milik universitas Australia di Indonesia akan berdampak signifikan pada aspirasi mahasiswa Indonesia yang belum mampu untuk berkuliah secara langsung di Australia. Di lain sisi, hal tersebut akan mengurangi beban anggaran Pemerintah Indonesia untuk mendanai PTN karena permintaan pendidikan tinggi yang semakin melonjak (Group of Eight 2016). Dengan inisiasi membuka kesempatan pendirian kampus cabang dari universitas-universitas berkelas dunia, pemerintah berkeinginan untuk semakin kompetitif secara global pada lingkup *knowledge economy* dan berambisi menjadi *hub* di kawasan untuk pendidikan tinggi (Lane 2011, 373). Namun, di sisi lain masih terdapat hambatan untuk mendirikan kampus cabang universitas Australia di Indonesia. Hal ini dalam konteks *Stag Hunt* menjadi potensi *defect*.

Potensi *defect* dapat terjadi pada kondisi *Stag Hunt* apabila terdapat pihak yang melakukan manuver dan tidak melanjutkan niatnya untuk memburu rusa, sehingga yang terjadi hanya pada pilihan kelinci. Dalam konteks perundingan IA-CEPA, kedua negara sebenarnya tidak menunjukkan sikap *defect*. Namun, untuk memastikan kerja sama pendidikan tinggi termuat dalam IA-CEPA, terdapat beberapa kondisi yang pada konteks tertentu akan memungkinkan Australia maupun Indonesia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan negosiasi tersebut atau *defect*. Potensi *defect* oleh salah satu atau kedua negara akan mengakibatkan kebuntuan dalam proses negosiasi sebab masing-masing pihak tidak menemukan solusi yang sesuai dengan kondisinya. Kondisi tersebut terjadi pada Indonesia

karena masih memiliki beberapa isu tertentu yang mungkin menjadi pertimbangan besar, sehingga Australia perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu ini sebab pasar dan peluang yang besar atas sektor pendidikan tinggi tidak serta merta menumbuhkan keinginan kerja sama apabila masih terdapat isu-isu tertentu.

Tabel 3.4 Isu-Isu dalam Pendirian Kampus Cabang di Indonesia

No	Kategori	Keterangan
1	Persaingan di Pasar Lokal dan Global	Calon mahasiswa akan sangat mungkin lebih memilih belajar langsung secara *onshore* daripada di kampus cabang karena pengalaman pembelajaran dan lingkungan yang diinginkan. Selain itu, persaingan dengan perguruan tinggi lokal akan terjadi karena akan mengambil pangsa pasar yang sedikit besar akan berdampak.
2	Biaya Pendidikan	Rerata biaya pendidikan di PTN berkisar antara Rp40.000.000-an sampai Rp60.000.000-an, bahkan biaya di PTS akan semakin mahal (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 29). Hal ini bisa saja menurunkan minat calon mahasiswa yang akan belajar di kampus cabang universitas Australia sebab sebagai perbandingan, biaya pendidikan pada Program Studi Teknik Program Sarjana di Monash University, Malaysian Sunway Campus menelan biaya mencapai sekitar Rp178.000.000-an sampai Rp243.000.000-an (The Australia-Indonesia Centre 2019b, 29). Biaya yang mahal ini akan menjadi pertimbangan besar bagi calon mahasiswa.
3	Visa dan Izin Tinggal	Berdasarkan aturan di Indonesia, Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki batasan izin tinggal dengan durasi tertentu, yakni antara 1 tahun sampai 5 tahun, sehingga akan memengaruhi jumlah dan durasi yang diizinkan (Jayanti 2023). Hal ini bisa menjadi hambatan untuk memastikan staf dari kampus asal bekerja pada kampus cabang di Indonesia.
4	Kemampuan bahasa Inggris	Kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang akan berdampak selama kegiatan dan proses pembelajaran sebab kampus cabang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar (English First 2025).
5	Kualifikasi Calon Mahasiswa	Sistem pendidikan menengah di Indonesia dilihat tidak begitu linear dan memenuhi persyaratan pendaftaran pada sistem pendidikan tingi asing (The Australia-Indonesia Centre 2019a).

No	Kategori	Keterangan
6	Risiko Reputasi	Penyelenggaraan yang kurang tepat akan memperburuk citra dan merek universitas Australia. Hal ini bisa meliputi, yakni (1) gagal dalam mendapatkan jumlah mahasiswa yang ideal, (2) penyelenggaraan kurikulum kampus cabang yang tidak bersaing, dan (3) penyediaan fasilitas dan layanan yang belum optimal (Department of Foreign Affairs and Trade 2021, 102).
7	Kesesuaian Bidang Studi	Program studi yang ditawarkan mungkin tidak sesuai dan memenuhi persyaratan akreditasi untuk memastikan kualitas yang diberikan tetap sesuai dengan standar di Indonesia (PwC Indonesia 2023, 15).
8	Peraturan Pekerjaan	Adanya batasan dan aturan merekrut TKA yang ketat berpotensi pada pembatasan jumlah staf yang direkrut (Jayanti 2023b).

Isu yang terdapat pada Tabel 3.4 di atas merupakan kondisi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Australia dalam bekerja sama di sektor pendidikan tinggi dengan Indonesia atau dalam konteks *Stag Hunt* menjadi potensi *defect* baik bagi Australia maupun Indonesia. Selain isu persaingan di pasar, terdapat potensi *defection* yang lain, yakni kesesuaian regulasi. Sampai 2018, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 belum mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain. Pasal tersebut secara umum memperbolehkan pendirian PTA di Indonesia dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Perlu akreditasi dan/atau pengakuan dari negara asal;
2. Penetapan daerah, jenis, dan program studi yang akan diselenggarakan PTA oleh pemerintah; dan
3. PTA wajib: (1) memperoleh izin pemerintah, (2) bersifat nirlaba, (3) bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, (4) memprioritaskan pekerja dari

Indonesia untuk dosen dan tenaga pendidikan, dan (5) mendukung kepentingan nasional Indonesia (Pemerintah Indonesia 2012).

Sampai Kuartal 3 tahun 2018, UU No. 12 Tahun 2012 masih belum mengatur regulasi pendirian kampus cabang PTA di Indonesia secara gamblang mengenai mekanisme dan aturan lainnya. Padahal, jika merujuk pada lini masa proses negosiasi IA-CEPA, isu ini menjadi penting dibahas dalam perundingan sebab regulasi yang jelas akan menentukan minat dan potensi investasi PTA di Indonesia. Sementara itu, kondisi yang demikian akan memungkinkan penarikan keinginan Australia untuk membuka kampus cabang universitas-universitas asal negaranya di Indonesia, sehingga kondisi yang demikian mempertebal potensi *defect* oleh Australia. Namun, pada Oktober 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTA melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permen Ristekdikti) Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur pendirian PTA, seperti:

1. Tujuan pendirian;
2. Persyaratan pendirian, yakni lokasi, syarat administrasi, sifat pendirian, dan reputasi;
3. Kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk pendidikan, penelitian, dan inovasi untuk masyarakat serta industri;
4. Bentuk dan macam PTA;
5. Ketentuan pekerja;
6. Kewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
7. Prosedur pendirian (Pemerintah Indonesia 2018).

Dengan demikian, sebenarnya potensi *defect* bagi Australia pada aspek kejelasan regulasi mengenai pendirian kampus cabang tidak lagi muncul karena dalam proses perundingan IA-CEPA aturan ini diundangkan di tengah proses negosiasi. Namun, isu *defect* masih dapat terjadi apabila Australia masih memiliki kekhawatiran sebagaimana isu-isu pada Tabel 3.4. Kedua negara, secara umum menunjukkan strategi *cooperate* untuk bekerja sama dalam sektor pendidikan tinggi melalui upaya-upaya yang ditempuh dalam perundingan IA-CEPA. Di lain pihak, potensi *defect* dominan berada pada Australia dengan kekhawatiran dan ketidakpastian regulasi, sedangkan di sisi Indonesia, potensi *defect* terjadi dengan kekhawatiran atas isu liberalisasi pendidikan dan persaingan pasar antar-universitas di dalam negeri.

3.3 Analisis *Payoff* dalam Upaya Kerja sama Pendidikan Tinggi

Dalam *Stag Hunt*, upaya masing-masing pihak untuk bertindak dapat digambarkan melalui matriks untuk melihat tindakan dan *payoff* dari kedua pihak. Untuk itu, pada Tabel 3.5 akan diilustrasikan matriks kedua pihak dalam konteks *Stag Hunt* dengan menganalisis kondisi dan skema optimal maupun risiko ketidakseimbangan apabila salah satu pihak memiliki potensi *defect*. Pemilihan strategi *cooperate* oleh kedua negara akan menghasilkan *payoff* optimal bagi kedua negara, sedangkan jika memilih *defect* justru memiliki risiko penurunan keuntungan yang seharusnya didapat melalui kerja sama.

Selama proses negosiasi, Australia dan Indonesia menunjukkan sikap untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua pihak dengan menjalankan upaya bersama melalui perundingan-perundingan, yakni demi mendapatkan hasil (C, C).

Komitmen ini tercermin dengan memerhatikan kepentingan jangka panjang bagi kedua negara berdasarkan fondasi kerja sama yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Australia dan Indonesia mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA, membentuk dan mengundang masukan dari lembaga yang berisi pengusaha di kedua negara, sekaligus mempertimbangkan pasar yang ada dengan memasukkan isu pendidikan dalam proses negosiasi merupakan sikap *cooperate* yang dilakukan oleh kedua negara ini. Inisiatif tersebut dilakukan paralel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar mengurangi potensi disinformasi pada kedua negara. Selain itu, komitmen yang ditunjukkan oleh kedua negara memiliki arah yang positif sebab Australia dan Indonesia memiliki irisan kepentingan dan kesamaan prinsip. Namun, meskipun sikap kooperatif ditunjukkan oleh kedua negara, tetap ada potensi *defect* yang memungkinkan salah satu negara, bahkan kedua negara untuk tidak melanjutkan pembahasan kerja sama pendidikan tinggi dalam IA-CEPA.

Kecurigaan atas ketidakseimbangan manfaat atau adanya ketidakpastian regulasi lokal dapat memicu tindakan *defect*. Dalam konteks kerja sama anatrnegara, unsur regulasi domestik merupakan hal yang penting karena akan memastikan keselarasan dengan kebijakan-kebijakan strategis di masa mendatang. Selain itu, potensi *defect* bisa terjadi karena masing-masing pihak sangat mungkin memiliki perbedaan pandangan mengenai proses yang berlangsung, sehingga kedua pihak akan saling memerhatikan tindakan dari setiap pihak. Hal tersebut karena *Stag Hunt* memiliki asumsi bahwa tindakan pemain akan memengaruhi respons dan keputusan pemain yang lainnya.

Tabel 3.5 Skema Hasil *Stag Hunt* mengenai Upaya Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia

Stag Hunt	**Indonesia *Cooperate*** (Mengusahakan kerja sama pendidikan tinggi berupa pendirian kampus cabang di Indonesia)	**Indonesia *Defect*** (Menolak upaya kerja sama pendidikan tinggi)
Australia *Cooperate* (Mengusahakan kerja sama pendidikan tinggi berupa pendirian kampus cabang di Indonesia)	**(C, C)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi berupa pendirian kampus cabang di Indonesia pada kerangka IA-CEPA disetujui dan diregulasi oleh kedua negara karena hambatan dan kekhawatiran diatasi.	**(C, D)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA disetujui oleh kedua negara secara terbatas pada lingkup tertentu, tidak untuk mendirikan kampus cabang di Indonesia.
Australia *Defect* (Menolak upaya kerja sama pendidikan tinggi)	**(D, C)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA disetujui oleh kedua negara secara terbatas pada lingkup tertentu, tidak untuk mendirikan kampus cabang di Indonesia.	**(D, D)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA tidak disetujui oleh kedua negara tanpa terkecuali di semua lingkup.

Berdasarkan Tabel 3.5, penting untuk menelisik upaya dan kondisi pada kedua negara guna memetakan strategi *cooperate* dan potensi *defect*, sehingga dalam Tabel 3.6 akan menjelaskan implementasi *Stag Hunt* selama proses perundingan IA-CEPA sekaligus memaparkan *payoff* yang didapat oleh kedua negara berdasarkan kombinasi strategi *cooperative* ataupun *defect* sebagai hasil dari proses penjajakan tersebut.

Tabel 3.6 Implementasi *Stag Hunt* dalam Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia

No	Australia	Indonesia	Hasil *Payoff* dalam Skema *Stag Hunt*
1	Australia berusaha mereaktivasi perundingan IA-CEPA	Indonesia berusaha mereaktivasi perundingan IA-CEPA	(C, C) Perundingan IA-CEPA kembali dilakukan oleh kedua negara pada 2016
2	Melibatkan pelaku usaha untuk memberikan masukkan atas perundingan	Melibatkan pelaku usaha untuk memberikan masukkan atas perundingan	(C, C) Kedua negara membentuk Indonesia-Australia Business Partnership Group
3	Kekhawatiran atas: 1. Ketidakpastian regulasi di Indonesia (sampai Kuartal 3); 2. Visa dan izin tinggal; 3. Kemampuan berbahasa Inggris; 4. Kualifikasi calon mahasiswa; 5. Risiko reputasi; 6. Kesesuaian bidang studi; dan 7. Peraturan pekerjaan.	Kekhawatiran atas: 1. Persaingan di pasar pendidikan tinggi antar-universitas lokal; 2. Kesesuaian bidang studi dengan standar Indonesia; dan 3. Isu liberalisasi pendidikan tinggi dalam diskursus masyarakat.	(D, D) Kekhawatiran kedua negara berpotensi untuk menarik wacana pengaturan pendidikan tinggi dalam negosiasi IA-CEPA
4	Mempertahankan model kerja sama yang sudah ada, tanpa menginisiasi pembukaan kampus cabang di Indonesia	Mempertahankan model kerja sama yang sudah ada, tanpa menginisiasi pembukaan PTA di Indonesia	(C, D) atau (D, C) Australia dan Indonesia tetap bekerja sama dalam lingkup pendidikan tinggi di IA-CEPA, tetapi tidak untuk mendirikan dan/atau membolehkan PTA beroperasi di Indonesia

Australia dan Indonesia memiliki *payoff* yang diinterpretasikan berdasarkan sikap masing-masing negara, sehingga menghasilkan (C, C), (D, D), (C, D), atau (D, C) sebagaimana dalam Tabel 3.6. Jika ditinjau dengan *payoff* angka maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. (C, C) menghasilkan (4, 4).
2. (D, D) menghasilkan (2, 2).
3. (C, D) menghasilkan (1, 3).
4. (D, C) menghasilkan (3, 1).

Kedua negara dalam proses perundingan IA-CEPA menunjukkan strategi *cooperate* maupun *defect*. Strategi tersebut dipengaruhi dengan kesepahaman masing-masing pihak mengenai kerja sama pendidikan tinggi merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan SDM. Isu yang menghambat untuk upaya kerja sama pendidikan tinggi selama proses perundingan IA-CEPA adalah regulasi yang gamblang mengenai pendirian PTA di Indonesia, dalam isu-isu yang lain, seperti pada Tabel 3.6 tidak begitu menjadi hambatan besar selama proses negosiasi pada kurun waktu 2016—Kuartal 3 2018. Ketidakjelasan regulasi tersebut berpotensi keraguan bagi Australia dalam memastikan pembahasan aspek pendidikan tinggi, khususnya pembukaan kampus cabang oleh universitas-universitas Australia. Namun, regulasi pendirian PTA kemudian diatur dalam Permen Ristekdikti No. 53 Tahun 2018 Tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri, sehingga regulasi ini yang semula merupakan potensi *defect* berubah menjadi strategi *cooperate* yang diinisiasi oleh Indonesia guna memastikan akan mendapatkan hasil terbaik, (C, C). Dengan demikian, apabila diilustrasikan dalam

matriks kombinasi skema hasil dengan *payoff Stag Hunt* pada konteks kerja sama pendidikan tinggi Australia dan Indonesia ialah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil *Payoff* Kerja sama Pendidikan Tinggi Australia dan Indonesia

Stag Hunt	**Indonesia *Cooperate*** (Mengusahakan kerja sama pendidikan tinggi karena melakukan upaya *cooperate*)	**Indonesia *Defect*** (Menolak upaya kerja sama pendidikan tinggi karena kekhawatiran pada isu-isu tertentu)
Australia *Cooperate* (Mengusahakan kerja sama pendidikan tinggi karena melakukan upaya *cooperate*)	**(C, C) / (4, 4)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA disetujui oleh kedua negara.	**(C, D) / (1, 3)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA disetujui oleh kedua negara secara terbatas pada lingkup tertentu, tetapi tidak untuk mendirikan dan/atau membolehkan PTA beroperasi di Indonesia.
Australia *Defect* (Menolak upaya kerja sama pendidikan tinggi karena kekhawatiran pada isu-isu tertentu)	**(D, C) / (3, 1)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA disetujui oleh kedua negara secara terbatas pada lingkup tertentu, seperti yang selama ini sudah dikolaborasikan.	**(D, D) / (2, 2)** Upaya kerja sama pendidikan tinggi pada kerangka IA-CEPA tidak disetujui oleh kedua negara tanpa terkecuali di semua lingkup.

Dalam perjalanan negosiasi IA-CEPA, aspek pendidikan tinggi pada akhirnya masuk dalam perjanjian tersebut yang disahkan pada 26 November 2019 oleh Australia dan 29 Februari 2020 oleh Indonesia. Setelah mencapai kesepakatan tersebut, sektor pendidikan tinggi diatur secara rinci mengenai ketentuan, syarat, dan hal-hal teknis lainnya dalam IA-CEPA yang terdapat dalam dokumen Indonesia

Services and Investment Schedules: Catatan Pengantar yang dipublikasi oleh Kementerian Perdagangan (2020) sebagai berikut:

Tabel 3.8 Ketentuan Kerja sama Pendidikan Tinggi dalam IA-CEPA

Jasa Pendidikan	
Syarat-Syarat Umum Kecuali disepakati sebaliknya, kehadiran komersial dari penyelenggara jasa asing diizinkan hanya melalui sebuah lembaga pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan wajib memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Pengaturan saling mengakui antara lembaga-lembaga terkait tentang kredit, program, dan sertifikasi diprasyaratkan; 2. Lembaga pendidikan asing yang memasok jasa wajib membentuk sebuah kemitraan dengan mitra lokal; Instruktur bahasa asing wajib penutur asli dan bahasa Indonesia; 3. Lembaga-lembaga pendidikan asing wajib tercatat di Daftar Pendidikan Asing Terakreditasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mitra lokalnya wajib diakreditasi; 4. Meskipun telah diatur pada bagian horizontal, kehadiran komersial wajib didirikan dalam bentuk yayasan; 5. Lembaga-lembaga pendidikan asing yang bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dapat membuka lembaga-lembaga pendidikan di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan; 6. Jumlah pendidik wajib mencakup sedikitnya tiga puluh persen pendidik Indonesia; dan 7. Jumlah karyawan, selain pendidik dan kepalanya, wajib sekurang-kurangnya delapan puluh persen karyawan Indonesia.	
No	**Aturan Lainnya**
1	Dalam bentuk badan hukum nirlaba.
2	100 persen dari saham dapat dimiliki oleh orang asing.
3	Pengaturan saling pengakuan antara lembaga-lembaga yang relevan tentang kredit, program, dan sertifikasi diprasyaratkan.
4	Instruktur-instruktur bahasa asing wajib Penutur Bahasa Inggris
5	Lembaga-lembaga pendidikan bahasa asing wajib terakreditasi di Australia dan terdaftar di Kementerian Penelitian, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6	Di manapun di Indonesia tunduk pada uji kebutuhan ekonomi.
7	Syarat perizinan untuk pemasok-pemasok jasa asing dapat bervariasi dari yang berlaku untuk pemasok-pemasok jasa Indonesia.
8	Empat mata pelajaran wajib (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia) wajib diintegrasikan ke dalam kurikulum dan disampaikan oleh pengajar-pengajar Indonesia.

Sumber: Kementerian Perdagangan (2020).

Berdasarkan proses analisa faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan di IA-CEPA mengenai kerja sama pendidikan tinggi berupa latar belakang kerja

sama, kepentingan, upaya yang ditempuh (strategi *cooperative*), dan hambatan (potensi *defect*) masing-masing negara, IA-CEPA melahirkan konsensus kerja sama di sektor pendidikan tinggi yang salah satunya ialah Indonesia membolehkan pendirian kampus-kampus cabang Australia untuk bisa beroperasi dan melayani mahasiswa di Indonesia. Sistem pendidikan tinggi Australia berupa *offshore education* yang kemudian dikembangkan dalam prinsip *Transnational Education* (TNE) menjadi ruang bagi Australia untuk membuka kampus cabang universitas-universitasnya pada lingkup global, tak terkecuali Indonesia. Setelah kehadiran IA-CEPA, Australia akan menjadi negara pertama yang bisa berinvestasi di sektor pendidikan tinggi, seperti pendirian PTA sebagai upaya memperluas akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia dan bermuara pada ambisi *economic powerhouse* oleh kedua negara (Sebayang 2021; Gumelar 2018).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

IA-CEPA merupakan buah hubungan Australia dan Indonesia yang sudah terjalin sejak 75 tahun lalu. Kerja sama ini menangkap potensi masing-masing negara untuk bergerak bersama dan bertujuan menjadi *economic powerhouse*. Salah satu potensi tersebut ialah di sektor pendidikan tinggi sebab Australia memiliki daya tawar sistem pendidikan tinggi yang berkualitas, bereputasi, dan mumpuni, sedangkan Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam negeri dalam rangka memaksimalkan potensi SDM yang perlu dikelola dengan baik supaya dapat bersaing pada level global. Langkah tersebut diupayakan melalui pendirian kampus cabang universitas Australia di Indonesia sebagai *platform* peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas akses terhadap pendidikan tinggi.

Potensi yang ada pada masing-masing negara tidak serta merta menjadi faktor pendorong minat Australia dan Indonesia untuk mengupayakan kerja sama dalam proses perundingan IA-CEPA yang diaktifkan kembali pada tahun 2016. Dinamika yang berlangsung selama proses negosiasi oleh kedua negara memunculkan sikap-sikap tertentu dan memungkinkan untuk melanjutkan atau menghentikan upaya-upaya kerja sama pendidikan tinggi. Sikap-sikap tersebut dapat ditinjau dalam Teori *Stag Hunt* yang menempatkan posisi masing-masing negara pada ketergantungan satu sama lain. Australia dan Indonesia dapat melakukan strategi *cooperate* dan berpotensi *defect*, tergantung cara pandang masing-masing negara dalam melihat peluang dan hambatan yang ada selama

proses perundingan. Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa Australia dan Indonesia secara bersama-sama memiliki strategi *cooperate*, sehingga menghasilkan *payoff* (C, C). Meskipun demikian, selama proses negosiasi terdapat kekhawatiran dan hambatan yang terjadi pada kedua negara, sehingga masing-masing negara dapat menghasilkan *payoff* (C, D) atau (D, C). Pada akhirnya, IA-CEPA berhasil mengatur dengan gamblang mengenai kerja sama pendidikan tinggi untuk mendirikan kampus cabang universitas Australia di Indonesia pada dokumen perjanjian kerja sama tersebut yang diratifikasi oleh kedua negara, sehingga kedua negara memiliki strategi *cooperate* dan menghasilkan *payoff* (C, C).

4.2 Rekomendasi

Penelitian yang dilakukan mengenai kerja sama pendidikan tinggi Australia dan Indonesia dalam kerangka IA-CEPA menggunakan Teori *Stag Hunt* menghasilkan temuan berupa kebijakan negara dapat ditinjau menggunakan konsep tersebut. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam meninjau faktor-faktor lain di luar hasil temuan yang sangat mungkin luput dan tidak tertulis dengan baik. Dengan demikian, diharapkan terdapat penelitian lanjutan yang lebih holistik guna menemukan faktor-faktor lain sebagai ikhtiar penelitian ilmiah yang aktual dan berbasis kaidah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, Adi. 2023. "Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dari Era Habibie sampai Jokowi." 2023. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/050cf93ae7f5c05/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi.

———. 2024. "Populasi Kelas Menengah Indonesia Kian Berkurang." 2024. https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/05/populasi-kelas-menengah-indonesia-kian-berkurang.

Akhmaloka, Badri Munir Sukoco, Budi Widjaja Soetjipto, Docki Saraswati, Ferani Eva Zulvia, Hermawan Kresno Dipojono, Indra wijaya Kusuma, dkk. 2023. *Strategi Peningkatan Kualitas Menuju Perguruan Tinggi Berkelas Dunia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/03/BUKU-STRATEGI-PENINGKATAN-KUALITAS-MENUJU-PERGURUAN-TINGGI-BERKELAS-DUNIA.pdf.

Anfasa, Fika Aulia. 2023. "Resiprositas Indonesia dan Australia dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021." *Ecoplan* 6 (1): 1–7. https://doi.org/10.20527/ECOPLAN.V6I1.622.

Astuti, Retno Sunu. 2016. "Pengembangan Kapasitas : Strategi Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Gema Publica* 2 (1): 1–12. https://doi.org/10.14710/GP.2.1.2016.1-12.

Athukorala, Prema Chandra. 2020. "Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics." *Foreign Trade Review* 55 (1): 13–20. https://doi.org/10.1177/0015732519886771.

Australia Indonesia Business Council. 2016. "Shaping the IA-CEPA: Realising Stakeholder Aspirations." https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indonesia-australia-business-council.pdf.

Australian Bureau of Statistics. 2024. "Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product." 2024. https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/sep-2024.

Australian Government. 2016. "National Strategy for International Education 2025."

Benner, Mats, Jonathan Grant, dan Mary O'Kane. 2022. "Higher Education in Australia." Dalam *Crisis Response in Higher Education*, 51–63. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97837-2_4.

Bhaskara, Ignatius Loyola Adhi. 2016. "Indonesia-Australia Fokus Pada Sektor Jasa dan Ekonomi Digita." 2016. https://tirto.id/indonesia-australia-fokus-pada-sektor-jasa-dan-ekonomi-digita-qyC.

Campbell, Clarice. 2020. "CEPA?" www.aiya.org.au. 2020. https://aiya.org.au/id/2020/07/05/what-is-the-ia-cepa/#:~:text=The%20IA%2DCEPA%20is%20anticipated,strengthen%20the%20existing%20economic%20partnership.

Chapman, Anne, dan David Pyvis. 2015. *Enhancing Quality in Transnational Higher Education: Experiences of Teaching and Learning in Australian Offshore Programs*. Lanham, United States: Lexington Books. https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/11225.

Council of Europe. 2002. "Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education." 2002. https://rm.coe.int/090000168097c674.

Croucher, Gwilym, Kristine Elliott, Ed Yencken, dan William Locke. 2021. "Australia's Higher Education Delivery Offshore and Online – Trends, Barriers and Opportunities." https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/research/international-higher-education/trends,-barriers-and-opportunities-of-australias-higher-education-delivery-offshore.

Deloitte. 2015. "The Importance of Universities to Australia's Prosperity." https://www.deloitte.com/au/en/services/economics/perspectives/importance-universities-australias-prosperity.html.

———. 2020. "The Importance of Universities to Australia's Prosperity." www.deloitte.com/au/deloitte-access-economics.

Department of Education. 2019. "Delivery of Australian Higher Education Courses Offshore." 2019. https://internationaleducation.gov.au/research/offshoreeducationdata/pages/transnational-education-data.aspx.

———. 2023. "Offshore Delivery of Australian Higher Education Courses." 2023. https://www.education.gov.au/international-education-data-and-research/offshore-delivery-australian-higher-education-courses.

———. 2024a. "International Student Monthly Summary and Data Tables." 2024. https://www.education.gov.au/international-education-data-and-research/international-student-monthly-summary-and-data-tables.

———. 2024b. "Key findings from the 2023 Higher Education Student Statistics." 2024. https://www.education.gov.au/higher-education-statistics/student-data/selected-higher-education-statistics-2023-student-data/key-findings-2023-student-data.

Department of Foreign Affairs and Trade. 2016. "Third Round of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Negotiations." 2016. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/third-round-of-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-negotiations.

———. 2018. "Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia." www.dfat.gov.au. 31 Agustus 2018. https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.

———. 2019. "Submissions and Public Consultations." 2019. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/public-submissions-to-the-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-negotiations.

———. 2021. *A Blueprint for Trade and Investment with Indonesia*. Department of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/blueprint-trade-investment-indonesia.pdf.

———. 2024. “Australia’s Trade in Goods and Services S023.” 2024. https://www.dfat.gov.au/trade/trade-and-investment-data-information-and-publications/trade-statistics/trade-in-goods-and-services/australias-trade-goods-and-services-2023.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. 2022. “Statistik Pendidikan Tinggi 2022.”

Elkin, Graham, Faiyaz Devjee, dan John Farnsworth. 2005. “Visualising the ‘Internationalisation’ of Universities.” *International Journal of Educational Management* 19 (4): 318–29. https://doi.org/10.1108/09513540510599644/FULL/PDF.

English First. 2025. “EF English Proficiency Index.” 2025. https://www.ef.com/wwen/epi/regions/asia/indonesia/.

Fadhli, Rahmat. 2024. “Mengapa Tak Banyak Mahasiswa Asing yang Mau Kuliah di Indonesia?” 2024. https://theconversation.com/mengapa-tak-banyak-mahasiswa-asing-yang-mau-kuliah-di-indonesia-229504.

Ferdiansyah R. 2015. “Implementasi dan Hambatan Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia.” *Andalas Journal of International Studies* 4 (2): 123–46. https://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/43.

Fitriani, Evi. 2018. “President Joko Widodo’s Foreign Policy: Implications for Indonesia- Australia Relations.” Dalam *Strangers Next Door? Indonesia and Australia in the Asian Century*, disunting oleh Tim Lindsey dan Dave McRae, 31–54.

Frost, Frank. 2016. *Engaging the Neighbours: Australia and ASEAN since 1974*. ANU Press. https://doi.org/10.22459/EN.07.2016.

Gitiyarko, Vincentius. 2023. “Penduduk Bekerja Berpendidikan Rendah Masih Dominan - Kompas.id.” 2023. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/07/penduduk-bekerja-berpendidikan-rendah-masih-dominan.

Group of Eight. 2016. “Group of Eight Submission to the Department of Foreign Affairs and Trade Regarding the Proposed Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).” https://www.education.gov.au/news/new-council-international-education.

Gumelar, Galih. 2018. “IA-CEPA: Investasi Pendidikan Hanya Dibuka untuk Australia.” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180907165652-92-328584/ia-cepa-investasi-pendidikan-hanya-dibuka-untuk-australia.

Harususilo, Yohanes Enggar. 2023. “PresUniv Pertahankan Capaian Jumlah Mahasiswa Asing Terbanyak.” 8 Februari 2023. https://edukasi.kompas.com/read/2023/02/08/141445771/presuniv-pertahankan-capaian-jumlah-mahasiswa-asing-terbanyak.

Healey, Nigel Martin, Fabrizio Trifiro, Richard Cavington, dan Abigail Jones. 2022. “Indonesia International Branch Campus Feasibility Study and Overview of TNE Across ASEAN.” *European Commission of Consumer, Trade, and Industry Services*. https://www.researchgate.net/publication/361016583_Indonesia_international_branch_campus_feasibility_study_and_overview_of_TNE_across_ASEAN.

Hutabarat, Binsar Antoni. 2017. “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi.”

Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat 4 (2): 146. https://doi.org/10.33550/SD.V4I2.69.

Indonesia-Australia Business Partnership Group. 2012. "Position Paper on Considerations towards the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)." https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/ia-bpg-position-paper.pdf.

Jayanti, Dian Dwi. 2023a. "Ketentuan Masa Kerja WNA di Indonesia | Klinik Hukumonline." 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-masa-kerja-wna-di-indonesia-lt572ff50051d2e/.

———. 2023b. "Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia | Klinik Hukumonline." 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia-lt557fb3beea80c/.

Jones, Elspeth, dan David Killick. 2013. "Graduate Attributes and the Internationalized Curriculum: Embedding a Global Outlook in Disciplinary Learning Outcomes." *Journal of Studies in International Education* 17 (2): 165–82. https://doi.org/10.1177/1028315312473655/FORMAT/EPUB.

Kemdikbudristek. 2025. "Statistik Pendidikan Tinggi." 2025. https://repositori.kemdikbud.go.id/.

Kemenko Perekonomian. 2018. "Pemerintah Luncurkan Making Indonesia 4.0." 2018. https://ekon.go.id/publikasi/detail/1443/pemerintah-luncurkan-making-indonesia-40.

Kementerian Perdagangan. 2020. "Dokumen Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA)." 2020.

———. 2024. "Total Ekspor Impor - Satu Data Perdagangan." 2024. https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-impor.

Kementerian Perindustrian. 2018. "Making Indonesia 4.0."

Knight, Jane. 2007. "Internationalization: Concepts, Complexities and Challenges." Dalam *Springer International Handbooks of Education*, 18:207–27. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_11.

Kompas.com. 2017. "Putaran Ke-6 IA CEPA, Indonesia Fokus Pada Kerja Sama Vokasi." 2017. https://money.kompas.com/read/2017/03/02/170000826/putaran.ke-6.ia.cepa.indonesia.fokus.pada.kerja.sama.vokasi.

Lane, Jason E. 2011. "Importing Private Higher Education: International Branch Campuses." *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 13 (4): 367–81. https://doi.org/10.1080/13876988.2011.583106.

Liyanag, Indika, dan Badeng Nima. 2016. "Internationalisation of Australia-China Higher Education in Times of Globalisation." Dalam *Multidisciplinary Research Perspectives in Education: Shared Experiences from Australia and China*, 1–6. SensePublishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-615-6_1.

Mahadevan, Renuka, dan Anda Nugroho. 2019. "Can the Regional Comprehensive Economic Partnership Minimise the Harm from the United States–China Trade War?" *World Economy* 42 (11): 3148–67. https://doi.org/10.1111/twec.12851.

Malik, Mohan. 2006. "Australia, America and Asia." *Pacific Affairs* 79 (4): 587–95.

Maneejuk, Paravee, dan Woraphon Yamaka. 2021. "The Impact of Higher Education on Economic Growth in ASEAN-5 Countries." *Sustainability 2021, Vol. 13, Page 520* 13 (2): 1–28. https://doi.org/10.3390/SU13020520.

Maringe, Felix. 2010. "The Meanings of Globalization and Internationalization in HE: Findings from a World Survey." Dalam *Globalization and Internationalization in Higher Education: Theoretical, Strategic and Management Perspectives*, disunting oleh Felix Maringe dan Nick Foskett, 17–34. Continuum International Publishing Group.

Marisa, Astari. 2020. "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019." *Jurnal transborders* 4 (1): 24–35.

Monash University. 2024. "The First Foreign University in Indonesia." 2024. https://www.monash.edu/indonesia/news/monash-university-the-first-foreign-university-in-indonesia.

Murthi, Mamta, dan Roberta Malee Bassett. 2022. "Higher Education: Understanding Demand and Redefining Values." 2022. https://blogs.worldbank.org/en/education/higher-education-understanding-demand-and-redefining-values.

Namira, Nabila Yasmin. 2021. "The Role of Bilateral Agreement as Pillars Post-Pandemic Economic Resilience: Capabilities Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) To Trade Growth Accelerator In Indonesia." *Mediasi Journal of International Relations* 4 (2): 1–18. https://doi.org/10.21111/MEDIASI.V4I2.10033.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2020. *Employment and Skills Strategies in Indonesia*. OECD Reviews on Local Job Creation. OECD. https://doi.org/10.1787/dc9f0c7c-en.

———. 2023. "Overview of the Education System (EAG 2024)." 2023. https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=EO.

———. 2024. "Education at a Glance 2024 - Country Notes: Australia." https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2024-country-notes_fab77ef0-en/australia_7cd500b6-en.html.

Organisation for Economic Co-operation and Development, dan Asian Development Bank. 2015. "Education in Indonesia." Reviews of National Policies for Education. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264230750-EN.

Patunru, Arianto, Andree Surianta, dan Pingkan Audrine. 2021. "Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse." Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

———. 2018. *Permen Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/140709/permen-ristekdikti-no-53-tahun-2018.

Prasetyo, Kanyadibya Cendana. 2024. "Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 3 (1): 1–11. https://doi.org/10.32734/LJSP.V3I1.15810.

Pratama, Andistya, dan Ginna Yuliana. 2024. “The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities.” *Audito Comparative Law Journal* 5 (1): 18–32.

PwC Indonesia. 2023. “Investment in the Indonesian University Sector: A Regulatory Overview for Foreign Universities.” www.pwc.be.

QS World University Rankings. 2025. “QS World University Rankings: South-Eastern Asia 2025.” 2025. https://www.topuniversities.com/asia-university-rankings/south-eastern-asia.

Qurtuby, Sumanto Al. 2023. “Ironi Perguruan Tinggi di Indonesia .” 2023. https://www.dw.com/id/ironi-perguruan-tinggi-di-indonesia/a-66744275.

Rusmin, Julia Hardianti, Adi Suryadi, dan Nurjannah Abdullah. 2021. “Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018.” *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1 (2): 134–53.

Savitri, Devita. 2024. “Ada 4 Universitas Asal Australia di Indonesia, Sudah Tahu?” 2024. https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7180765/ada-4-universitas-asal-australia-di-indonesia-sudah-tahu.

Sebayang, Rehia. 2021. “IA CEPA Bisa Jadi Opsi Perluas Akses Pendidikan Tinggi di RI.” 2021. https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-br-sebayang/ia-cepa-bisa-jadi-opsi-untuk-perluas-akses-pendidikan-tinggi-di-ri.

Shin, Jung Cheol, dan Grant Harman. 2009. “New Challenges for Higher Education: Global and Asia-Pacific Perspectives.” *Asia Pacific Education Review* 10 (1): 1–13. https://doi.org/10.1007/S12564-009-9011-6/TABLES/8.

Shirlow, Esmé. 2019. “The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Repeated Debates, New Issues and Open Question.” 2019. https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/24/the-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-repeated-debates-new-issues-and-open-questions/.

Sindhu, Jatswan S. 2023. “Regional Middle Powers and ASEAN: Japan, Australia, and India.” Dalam *The Elgar Companion to ASEAN*, disunting oleh Jörn Dosch dan Frederick Kliem, 222–33. Edward Elgar Publishing.

Skyrms, Brian. 2004. *The Stag Hunt and The Evolution of Social Structure*. Cambridge University Press.

Study Australia. 2024. “List of Australian Universities.” 2024. https://www.studyaustralia.gov.au/en/plan-your-studies/list-of-australian-universities.

Teo, Sarah. 2022. “Middle Powers Amid Sino-U.S. Rivalry: Assessing the ‘Good Regional Citizenship’ of Australia and Indonesia.” *Pacific Review* 35 (6): 1135–61. https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2075444.

Tertiary Education Quality and Standards Agency. 2024. “National Register.” 2024. https://www.teqsa.gov.au/national-register.

The Australia-Indonesia Centre. 2019a. “Indonesia’s Higher Education Systems.”

———. 2019b. “Stronger Education Partnership: Opportunities for Australian Education and Training Providers in Indonesia.” https://skills.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2019/08/Stronger-education-partnerships-Brochure.pdf.

Times Higher Education. 2025. “World University Rankings 2025.” 2025. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking#!/length/25/sort_by/name/sort_order/asc/cols/stats.

UNESCO Institute for Statistics. 2023. “Inbound Internationally Mobile Students by Continent of Origin.” 2023. https://data.uis.unesco.org/.

———. 2024a. “Inbound Internationally Mobile Students.” 2024. http://data.uis.unesco.org/.

———. 2024b. “Outbound Internationally Mobile Tertiary Students Studying Abroad.” 2024. http://data.uis.unesco.org/#.

Ungerer, Carl. 2007. “The ‘Middle Power’ Concept in Australian Foreign Policy.” *Australian Journal of Politics and History* 53 (4): 538–51.

Universities Australia. 2013. “An Agenda for Australian Higher Education a Smarter Australia.”

Viet Nam News. 2024. “VN Currently Has About 22,000 International Students, Highest Number in Nine Years.” 2024. https://vietnamnews.vn/society/1661730/vn-currently-has-about-22-000-international-students-highest-number-in-nine-years.html#.

Wahyudi, Imam. 2015. “Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1): 49–70. https://doi.org/10.32832/TAWAZUN.V8I1.1132.

Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Disunting oleh Masbur. FTK Ar-Raniry Press.

Wilkins, Stephen. 2016. “Establishing International Branch Campuses: A Framework for Assessing Opportunities and Risks.” *Journal of Higher Education Policy and Management* 38 (2): 167–82. https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1150547/ASSET/5297BFDF-32AB-46E1-9FBD-62C1B70BD2F8/ASSETS/IMAGES/CJHE_A_1150547_F0001_B.GIF.

Wilkins, Thomas. 2023. “Middle Power Hedging in the Era of Security/Economic Disconnect: Australia, Japan, and the ‘Special Strategic Partnership.’” *International Relations of the Asia-Pacific* 23 (1): 93–127. https://doi.org/10.1093/irap/lcab023.

World Bank. 2014. “Indonesia’s Higher Education System: How Responsive is it to the Labor Market?” Washington, DC. https://hdl.handle.net/10986/20017.

World Trade Organization. 2022. “The General Agreement on Trade in Services: An Introduction.” 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf.

Zamroni, M. Imam. 2008. “Industrialisasi Pendidikan Tinggi.” *Unisia* 31 (67): 1–22. https://doi.org/10.20885/UNISIA.V31I67.171.